

**PERANAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)
BAJOMULYO DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH
KABUPATEN PATI**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Manajemen Sumberdaya Pantai



diajukan oleh
ALI MULYONO
K.4A 099007

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2002**

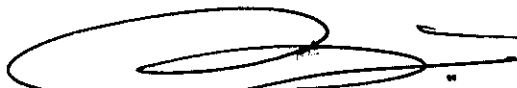
**PERANAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)
BAJOMULYO DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH
KABUPATEN PATI**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
ALI MULYONO
K.4A 099007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

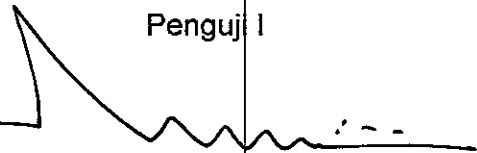
Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



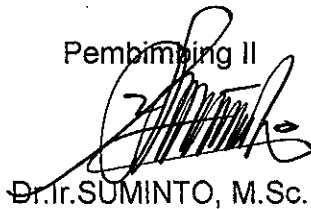
Prof. Dr. Ir. SLAMET BUDI PRAYITNO, M.Sc

Penguji I



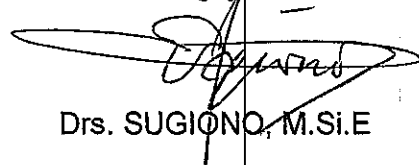
Prof. Dr. LACHMUDDIN SYA' RANI

Pembimbing II



Dr. Ir. SUMINTO, M.Sc.

Penguji II



Drs. SUGIONO, M.Si.E



Ketua Program Manajemen Sumberdaya Pantai



Prof. Dr. LACHMUDDIN SYA' RANI

INTISARI

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan salah satu unit kegiatan ekonomi di Kabupaten Pati yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Di samping itu keberadaan PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah melalui kontribusi retribusi TPI dan penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian PPI Bajomulyo dapat memperkuat kemampuan independensi dalam menyelenggarakan rumah tangga pemerintahannya menuju kemandirian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusi retribusi TPI terhadap PAD Kabupaten Pati. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi PPI Bajomulyo terhadap PDRB Kabupaten Pati dan mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo serta penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.

Metode yang digunakan adalah penelitian terapan dengan data primer berupa ketersediaan fasilitas, volume dan nilai produksi, jumlah kapal yang mendarat dan sekunder berupa nilai tambah bruto (raman) PPI Bajomulyo, data produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Pati dan Jawa Tengah, penerimaan retribusi TPI dari PPI Bajomulyo, penerimaan PAD (retribusi) Pemerintah Kabupaten Pati dan Jawa Tengah yang diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Pati, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati dan PPI Bajomulyo. Alat analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Efisiensi dan Efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 5 tahun pengamatan jumlah kapal yang mendarat di PPI Bajomulyo selalu menurun setiap tahun. Kontribusi PPI Bajomulyo terhadap PDRB Kabupaten Pati rata-rata sebesar 4,19 % dengan nilai LQ rata-rata sebesar 6,91, sedangkan kontribusi penerimaan retribusi TPI terhadap penerimaan total retribusi Kabupaten Pati sebesar 9,87% dengan nilai LQ rata-rata 1,01. Hasil analisis MRP menunjukkan bahwa aspek PDRB selama 5 tahun pengamatan termasuk kriteria cukup potensial sampai dengan sangat potensial, sedangkan ditinjau dari aspek penerimaan retribusi termasuk kriteria tidak potensial sampai dengan sangat potensial. Analisis tingkat efisiensi dan efektivitas menunjukkan tingkat sangat efisien dan sangat efektif, kecuali pada tahun 1998 dan 1999, dimana kondisi pada tahun tersebut terjadi transisi pemerintahan dan gejolak sosial masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap hampir seluruh kehidupan di Indonesia. Lebih lanjut keberadaan PPI Bajomulyo juga memberikan berbagai peluang berusaha baik langsung maupun tidak langsung dan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.273 orang pada tahun 2000.

ABSTRACT

Fish landing place is one of economical activities unit located in Pati regency, which is able to contribute on the economical growth rate in the surrounding area. The existence of Bajomulyo fish landing place at Pati regency is also able to support the local authority (otonomi daerah) conduction through the contribution of auction retribution and direct or indirect create employment opportunity. Therefore, Bajomulyo fish landing place of Pati regency is able to support the independent capability on the self-government conduction.

The aim at research was to know the role of Bajomulyo fish landing place, Pati regency, and its contribution on the economical growth and auction place retribution on regional income (PAD) of Pati regency. More specially the aims were to know the contribution of Bajomulyo fish landing place on the GRDP of Pati regency; the degree of effectiveness and efficiency of taking retribution in Bajomulyo fish landing place, and direct or indirect employment opportunity.

Method use was applied research, with primary data were the availability of facilities; volume and value of production; the total landing of fishing vessel. Whereas, the secondary data were gross added value of Bajomulyo fish landing place, gross regional domestic product (GRDP) of Pati Regency and Central Java Province, retribution income from auction place at Bajomulyo fish landing place, BPS-statistic of Pati Regency; Government of Central Java Province; Government of Pati Regency; Fishery and Marine Office of Central Java Province, Fishery and Marine Office of Pati Regency, and Bajomulyo fish landing place. To analyze the data, Location Quotient (LQ), Growth Ratio Model (MRP/GRM), efficiency and effectiveness, were used.

The finding of this research indicated that during five years periode, the total landing of fishing vessel at Bajomulyo fish landing place has decreased yearly. The average contribution of Bajomulyo fish landing place on the GRDP of Pati Regency was 4,19 % with the average value of LQ was 6,91, whereas the contribution of retribution income from auction place on total retribution income of Pati Regency was 9,87 % with the average value of LQ was 1,01. Growth Ratio Model (GRM) analysis indicated that GRDP aspect during five years periode resulted on the criteria of medium to highly potential, whereas from the income retribution aspect point of view indicated on the criteria of potential to highly potential. The analysis of effectiveness and efficiency level showed that level was greatly efficient and effective with an exception in 1998 and 1999, because of transition government and society movement/social riot occurred at the two years which greatly influenced on the life of most people in Indonesia. Moreover, existence of Bajomulyo fish landing place also create a business opportunity directly or indirectly and 5,273 woerkers in 2000.

KATA PENGANTAR

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan salah satu unit kegiatan ekonomi di Kabupaten Pati yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Di samping itu keberadaan PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah melalui kontribusi retribusi TPI dan penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Dengan peranan PPI yang demikian, maka PPI Bajomulyo dapat memperkuat kemampuan independensi dalam menyelenggarakan rumah tangga pemerintahannya menuju kemandirian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusi retribusi TPI terhadap PAD Kabupaten Pati. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi PPI Bajomulyo terhadap PDRB Kabupaten Pati dan mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo serta penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.

Kehadirat Allah Yang Maha Agung puji syukur dipanjatkan, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan pendapat sebagai upaya perbaikan akan diterima dengan baik.

Penyusunan tesis ini melibatkan banyak pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini dengan rasa hormat dan tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Prayitno, M.Sc. selaku dosen pembimbing utama yang menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini;
2. Bapak Dr. Ir. Suminto, M.Sc. selaku dosen pembimbing anggota yang juga telah memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak-bapak Tim Penguji yang telah memberikan masukan dan sumbang pikir untuk penyempurnaan penulisan tesis ini;
4. Bapak Prof. Dr. Lachmuddin Sya'rani, beserta seluruh Dosen dan Staf pengelola Program Magister Manajemen Sumberdaya Pantai UNDIP Semarang, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama studi.
5. Bapak Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah atas perkenan ijin dan kesempatan yang diberikan untuk mengikuti studi pada program Magister Manajemen Sumberdaya Pantai UNDIP Semarang;
6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi.
7. Bapak Bupati Pati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di daerahnya;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati dan Kepala PPI Bajomulyo yang telah memberikan bantuan dalam memperoleh data;

9. Secara khusus terima kasih disertai rasa cinta dan kasih sayang disampaikan kepada istri dan anak-anakku tersayang : Budi Respati, Agung dan Putri atas segala do'a, dukungan dan pengorbanannya, sehingga studi ini dapat diselesaikan;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan dan balasan yang setimpal dan semoga tesis ini bermanfaat adanya.

Semarang, Maret 2002

ALI MULYONO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ILUSTRASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Masalah Penelitian.....	4
1.3. Pendekatan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Penelitian.....	9
1.6. Waktu dan Tempat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Kerangka Pemikiran.....	11
2.2. Otonomi Daerah.....	12
2.3. Pengertian dan Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).....	14
2.4. Tempat Pelelangan Ikan (TPI).....	23
2.5. Retribusi.....	25
2.6. Teori Basis Ekonomi.....	26
2.7. Analisa Kemampuan Sektor.....	27
2.8. Efisiensi dan Efektivitas.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Materi Penelitian.....	30
3.2. Metode Penelitian.....	30
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4. Alat Analisis Data.....	33
3.4.1. Analisis location quotient (LQ).....	34
3.4.2. Analisis model rasio pertumbuhan (MRP).....	36
3.4.3. Analisis efektivitas dan efisiensi.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil Penelitian.....	40

4.2. Analisis dan Pembahasan.....	54
4.2.1. Volume Produksi dan Jumlah Kapal Mendarat...	54
4.2.2. Analisis location quotient (LQ).....	56
4.2.3. Analisis model rasio pertumbuhan.....	58
4.2.4. Analisis efisiensi dan efektivitas.....	60
4.2.5. Penyerapan tenaga kerja.....	62
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	 64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Rekomendasi.....	65
 DAFTAR PUSTAKA.....	 67
 LAMPIRAN.....	 70

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Deskripsi Overlay Nilai LQ dan RPs, Model Rasio Pertumbuhan (MRP).....	37
2. Ketersediaan Fasilitas di PPI Bajomulyo Tahun 2000.....	41
3. Jumlah Kapal Yang Mendarat di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000.....	42
4. Volume Produksi Per-jenis Alat Tangkap di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000.....	43
5. Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Laut di PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati dan Jawa Tengah 1996-2000.....	44
6. Perkembangan Total Nilai PDRB (ADHB) Kabupaten Pati dan Jawa Tengah 1996-2000.....	45
7. Perkembangan Target, Realisasi Penerimaan dan Jumlah Biaya Pemungutan Retribusi TPI di PPI Bajomulyo Kab. Pati 1996-2000.....	46
8. Perkembangan Kontribusi Nilai Tambah Bruto Perikanan Laut dan Retribusi TPI Terhadap Kabupaten Pati dan Jawa Tengah 1996-2000.....	49
9. Penyerapan Tenaga Kerja Langsung di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000.....	50
10. Penyerapan Tenaga Kerja Yang Terkait Ke Belakang Dengan Kegiatan Perikanan Laut di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000.....	52
11. Penyerapan Tenaga Kerja Yang Terkait Ke Depan Dengan Kegiatan Perikanan Laut di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000.....	53
12. Hasil Analisis LQ Ditinjau dari Aspek PDRB dan PAD (khususnya pos retribusi) di PPI Bajomulyo 1996-2000.....	57
13. Hasil Analisis MRP Overlay LQ dan RPs Ditinjau dari Aspek PDRB Sektor Perikanan di PPI Bajomulyo 1996-2000.....	58
14. Hasil Analisis MRP Overlay Nilai LQ dan RPs Ditinjau dari Aspek PAD (Retribusi) Sektor Perikanan PPI Bajomulyo 1996-2000.....	59
15. Perkembangan Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pungutan Retribusi TPI di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000.....	61
16. Penyerapan Tenaga Kerja Dengan Keberadaan Kegiatan Perikanan Laut di PPI Bajomulyo Tahun 2000.....	63

DAFTAR ILUSTRASI

Nomor	Halaman
1. Histogram Perkembangan Volume Produksi Ikan di PPI Bajomulyo dan Total Kabupaten Pati Tahun 1990-2000.....	3
2. Histogram Perkembangan Nilai Produksi Ikan (Raman) di PPI Bajomulyo dan Kabupaten Pati Tahun 1990-2000.....	3
3. Skema Pendekatan Masalah Penelitian.....	8
4. Kerangka Pemikiran Teoritis Interaksi Pemda, Pengguna dan PPI.....	11
5. Histogram Perkembangan Penerimaan Retribusi TPI di PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati dan Jawa Tengah Tahun 1996-2000.....	47
6. Histogram Perkembangan Penerimaan PAD (Khususnya Pos Retribusi) Kabupaten Pati dan Jawa Tengah Tahun 1996-2000	47
7. Grafik Kontribusi Nilai Tambah Bruto dan Retribusi TPI di PPI Bajomulyo Terhadap Kabupaten Pati Tahun 1996-2000.....	48
8. Histogram Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Langsung di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000 (orang).....	51
9. Histogram Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Terkait Ke Belakang Dengan Kegiatan Perikanan di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000 (orang).....	52
10. Hitogram Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Terkait Ke Depan Dengan Kegiatan Perikanan di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000 (orang).....	54
11. Grafik Hasil Analisis LQ Ditinjau Dari Aspek PDRB dan PAD (Khususnya Pos Retribusi) di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000.	57
12. Grafik Perkembangan Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pungutan Retribusi TPI di PPI Bajomulyo 1996-2000.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Peta Daerah Penelitian.....	70
2. Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Ikan Yang Di- lelangkan di PPI Bajomulyo dan Kabupaten Pati tahun 1996- 2000.....	71
3. Perkembangan Penerimaan Retribusi TPI di PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati dan Jawa Tengah Tahun 1996-2000.....	72
4. Perkembangan Penerimaan PAD (Khususnya Pos Retribusi) di Kabupaten Pati dan Jawa Tengah Tahun 1996-2000.....	73
5. Jumlah Kapal Motor Yang Mendarat di PPI Bajomulyo Sejak Dikembangkan (1983 – 2000).....	74
6. Perkembangan Volume dan Nilai Produksi PPI Bajomulyo Sejak Dikembangkan (1983 – 2000).....	75
7. Skema Pemungutan dan Penggunaan Retribusi TPI Berda- sarkan Perda 3 Tahun 2000.....	76
8. Perkembangan PADS Sektor Perikanan Kabupaten Pati Tahun 1996 – 2000.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu diciptakan perluasan dan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Todaro (1997:8) merumuskan dan menjabarkan tujuan pembangunan sebagai berikut :

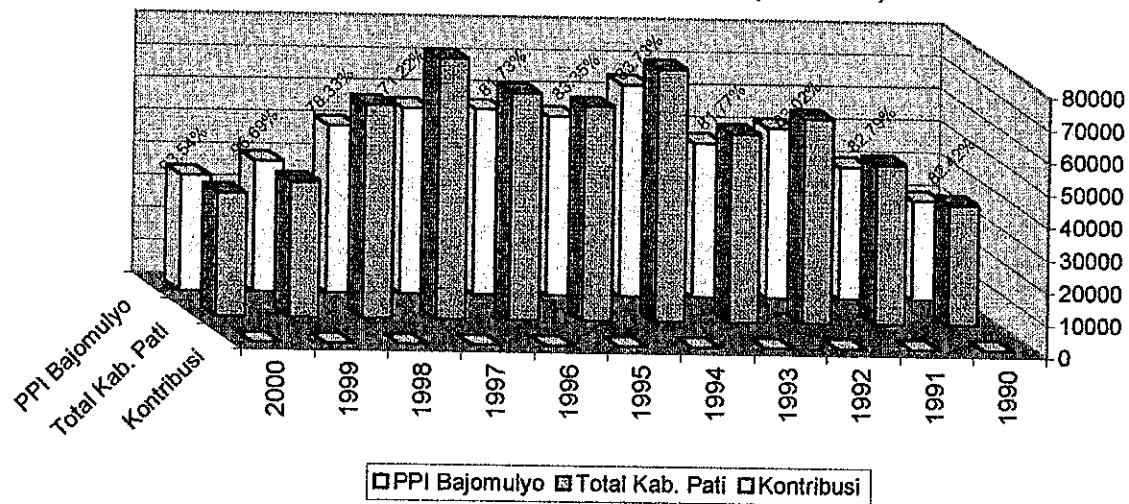
1. peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
2. peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa pendapatan, akan tetapi meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan dan kualitas pendidikan serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain,

namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan tujuan pembangunan tersebut tentunya diperlukan sejumlah dana atau anggaran yang berasal dari pemerintah di atasnya maupun yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba hasil usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah dari pos retribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati salah satunya berasal dari retribusi TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

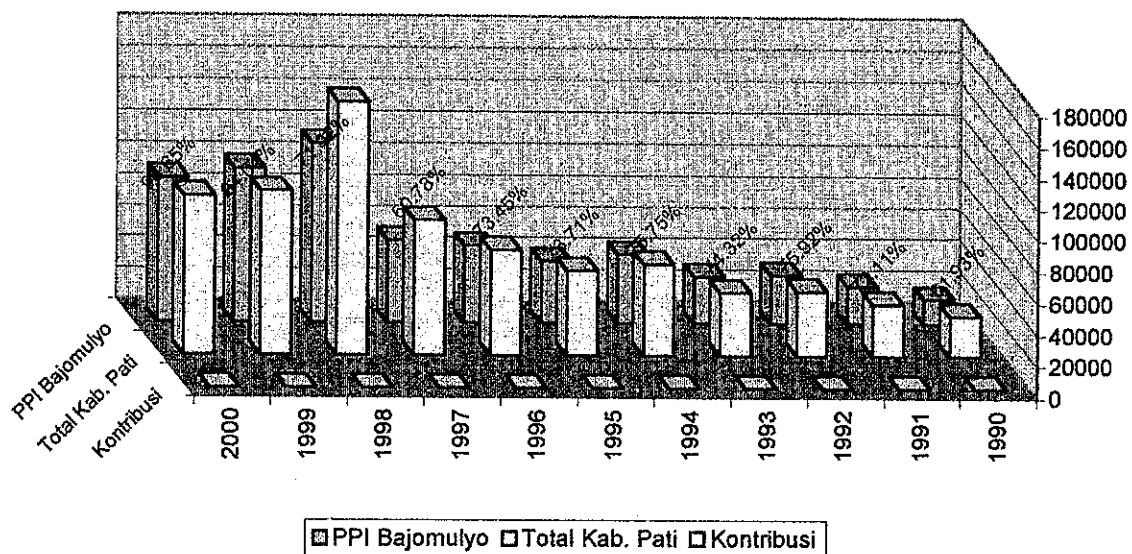
Kabupaten Pati terletak pada posisi $6^{\circ} 25' - 7^{\circ} \text{ LS}$ dan $110^{\circ} - 111^{\circ} \text{ BT}$ berhadapan langsung dengan perairan Laut Jawa dengan luas wilayah $1.491,13 \text{ km}^2$ dan memiliki garis pantai sepanjang 60 km (Dinas Perikanan Propinsi Dati Jawa Tengah, 1991 : 49). Kabupaten Pati memiliki 6 (enam) PPI yakni : PPI Bajomulyo, Pecangaan, Margotuhu, Sambiroto, Banyutowo dan PPI Puncel. Dari keenam PPI tersebut, PPI Bajomulyo merupakan PPI terbesar di Kabupaten Pati, dengan demikian keberadaannya diduga dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah dari kontribusinya terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi. Perkembangan volume dan nilai produksi ikan (raman) yang dilelangkan di PPI Bajomulyo dan Kabupaten Pati selama periode 1990-2000 disajikan pada Lampiran 1. Perkembangan volume produksi ikan yang dilelangkan di PPI Bajomulyo dan Kabupaten Pati secara secara grafis sebagaimana disajikan pada Ilustrasi 1.

Ilustrasi 1. Histogram Perkembangan Volume Produksi Ikan di PPI Bajomulyo dan Total Kabupaten Pati Tahun 1990-2000 (dalam Ton)



Perkembangan nilai produksi ikan (raman) yang dilelangkan di PPI Bajomulyo dan dilelangkan di seluruh PPI Kabupaten Pati selama periode 1990-2000 secara grafis disajikan pada ilustrasi 2 berikut :

Ilustrasi 2. Histogram Perkembangan Nilai Produksi Ikan (Raman) di PPI Bajomulyo dan Total Kabupaten Pati Tahun 1990-2000 (dalam Juta Rupiah)



Mengacu pada data pada ilustrasi 1 dan 2 di atas, maka PPI Bajomulyo merupakan salah satu unit kegiatan yang memiliki potensi dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Pati, karena kontribusi volume dan nilai produksinya sangat tinggi. Kontribusi volume produksi ikan yang dilelangkan di PPI Bajomulyo 71,22%-96,68%, sedangkan kontribusi nilai produksinya adalah sebesar 61,93%-94,04%. Keberadaan PPI Bajomulyo di samping sebagai pusat kegiatan perikanan laut juga sebagai sumber pendapatan asli daerah dan pusat kegiatan ekonomi yang dapat mendorong kegiatan ekonomi lain di sekitarnya.

1.2. Masalah Penelitian

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, maka kewenangan daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya semakin luas. Konsekuensi dari semakin luasnya kewenangan tersebut adalah bahwa prakarsa untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah juga harus lebih banyak datang dari daerah sendiri. Para perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana-rencana pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya (PAU-SE UGM, 2000 : I-1).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah diantaranya terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal (yang ada di daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang

berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999¹):298).

Keterbatasan sumberdaya merupakan masalah umum yang dihadapi hampir setiap daerah, oleh karena itu daerah harus pandai-pandai memobilisasi sumberdaya tersebut sebaik-baiknya. Laut merupakan potensi sumberdaya yang bersifat terbuka (*open acces*) dan merupakan "milik umum" (*common property*), sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk memanfaatkannya termasuk masyarakat kabupaten Pati. Berkaitan dengan hal tersebut perlu digali kemungkinan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sumberdaya kelautan, guna merealisasikan pembangunan di Kabupaten Pati.

Penerapan desentralisasi dalam wujud otonomi daerah menimbulkan permasalahan dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perimbangan keuangan yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli daerah sendiri merupakan sumber pendapatan utama (Sidik, 2000:1-4).

PPI Bajomulyo yang merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terbesar dan merupakan salah satu unit kegiatan ekonomi di Kabupaten Pati dapat memberikan kontribusinya dalam menunjang otonomi daerah Kabupaten Pati, baik di bidang pendapatan pemerintah melalui retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) maupun melalui pergerakan keterkaitan kegiatan usahanya dengan kegiatan usaha yang lain.

1.3. Pendekatan Masalah

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan salah satu aset daerah yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui jasa pelayanan yang diberikan kepada pengguna (*user*). Salah satu pelayanan yang diberikan kepada pengguna adalah jasa tempat pelelangan ikan yang merupakan tempat transaksi antara nelayan dan bakul ikan.

Peranan PPI bagi pembangunan suatu daerah diantaranya adalah sebagai pusat kegiatan perikanan laut, sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk memfokuskan penelitian yang berkaitan langsung dengan kegiatan perikanan agar memperoleh hasil penelitian yang optimal, maka peranan PPI yang akan diteliti adalah peranan PPI sebagai pusat kegiatan perikanan laut dan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan PPI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara detail merupakan bidang penelitian ilmu lain.

Gebrakan otonomi daerah yang telah digulirkan perlu disambut dengan segala upaya positif melalui peningkatan kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Keterbatasan sumberdaya merupakan salah satu kendala dan tantangan daerah yang harus dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya. Upaya yang harus dilakukan oleh daerah diantaranya adalah menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan tetap memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Sumber PAD yang besar dan *lumintu* akan dapat mempercepat dan mendorong pertumbuhan pembangunan di daerah. Salah satu sumber PAD yang dapat diandalkan Kabupaten Pati adalah retribusi TPI dari keberadaan PPI Bajomulyo.

Masalah penelitian didekati melalui pengamatan langsung (observasi) maupun melalui data sekunder tentang kontribusi retribusi TPI Bajomulyo terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pati; penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Pati. Dengan pendekatan tersebut dapat diketahui seberapa besar peranan PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

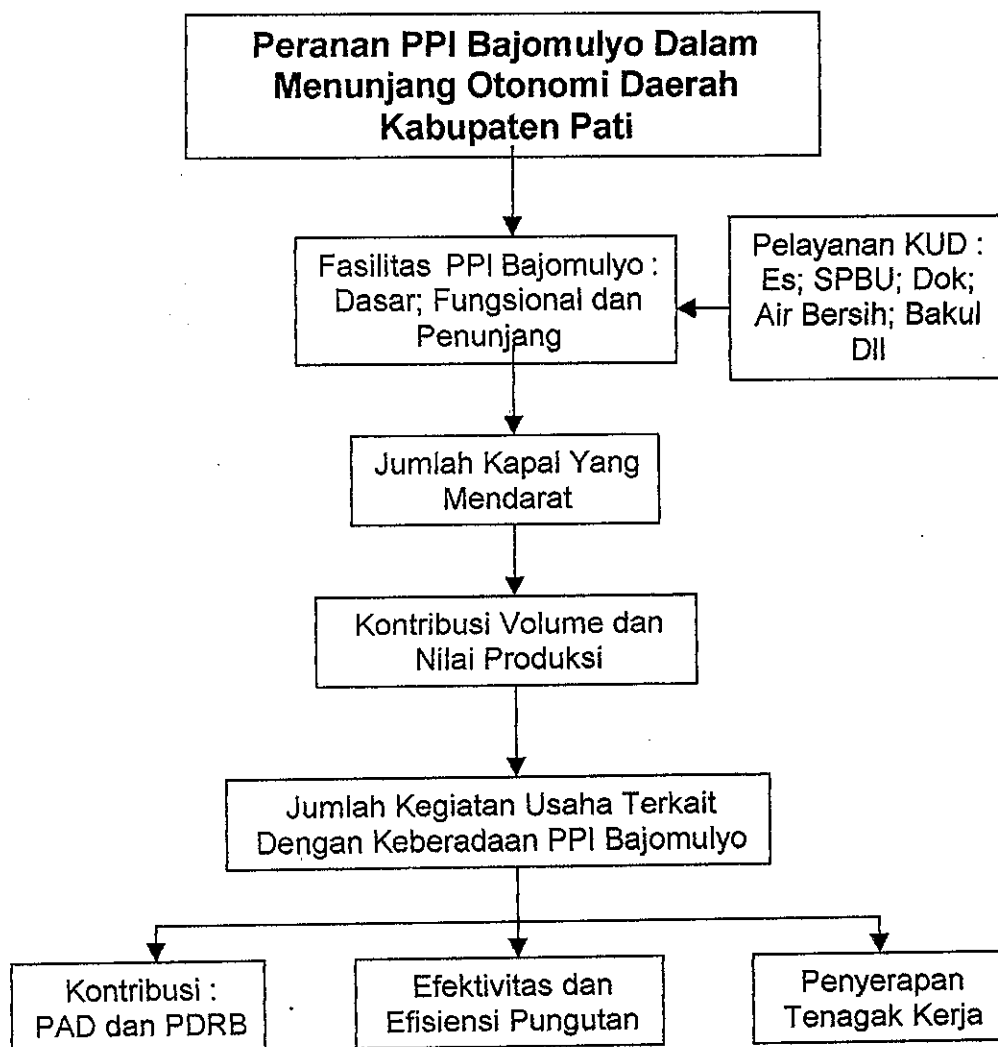
Penelitian tentang Peranan PPI Dalam Menunjang Otonomi Daerah, sampai saat ini belum banyak dilakukan. Salah satu kajian yang pernah dilakukan oleh Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah (2001) adalah Peningkatan Peran Pelabuhan Perikanan Dalam Menunjang Otonomi Daerah. Dalam kajian tersebut disampaikan bahwa PPI dan Pelabuhan Perikanan tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi juga berperan sebagai pusat kegiatan perikanan dan pusat kegiatan ekonomi secara umum.

Yuwoño (1999:41-61) mengidentifikasi sektor unggulan daerah dalam menghadapi implementasi UU 22/1999 dan UU 25/1999 di Kotamadya Salatiga periode analisis 1993-1996. Untuk menganalisis kemampuan kontribusi sektor digunakan alat analisis *Location Quotient (LQ)*. Metoda *Location Quotient* (Soesilo, 2000:9-17) dipergunakan untuk melihat potensi sektor dari suatu daerah dengan memperhatikan keunggulan komparatif sektor tersebut terhadap daerah referensi.

Perbedaan substansi dari penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih dititikberatkan pada peran PPI Bajomulyo sebagai pusat kegiatan perikanan dan sumber pendapatan asli daerah (PAD)

dalam menunjang otonomi daerah Kabupaten Pati. Dengan diketahuinya peranan PPI Bajomulyo dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Pati, maka lebih mempermudah dalam menyusun dan mengalokasikan sumberdaya dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara skematis pendekatan masalah dalam penelitian sebagaimana disajikan berikut ini :



Ilustrasi 3. Skema Pendekatan Masalah Penelitian

1. 4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pendekatan masalah yang telah disampaikan dimuka, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kemampuan/peranan dan kontribusi PPI Bajomulyo terhadap PDRB dan PAD Kabupaten Pati;
2. Menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD);
3. Menganalisis tingkat penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung di PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati;

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam menetapkan kebijakan pembangunan secara umum dan pembangunan perikanan khususnya. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah khasanah pustaka dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penelitian bagi para peneliti di masa datang di bidang sosial ekonomi perikanan.

1.6. Waktu dan Tempat Penelitian

1.6.1. Waktu penelitian

Untuk dapat menyusun tesis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat sarjana S-2 diperlukan waktu sekitar

6 bulan (Mei s/d Oktober 2001) sejak studi pustaka sampai dengan ujian.

Penelitian ini mencakup beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Studi pustaka
2. Konsultasi topik dan judul penelitian
3. Penyusunan dan pengajuan proposal
4. Kolokium (seminar proposal)
5. Perbaikan proposal
6. Pengumpulan data
7. Penyusunan dan konsultasi draft tesis
8. Seminar tesis
9. Penyempurnaan draft tesis
10. Ujian tesis

1.6.2. Tempat penelitian

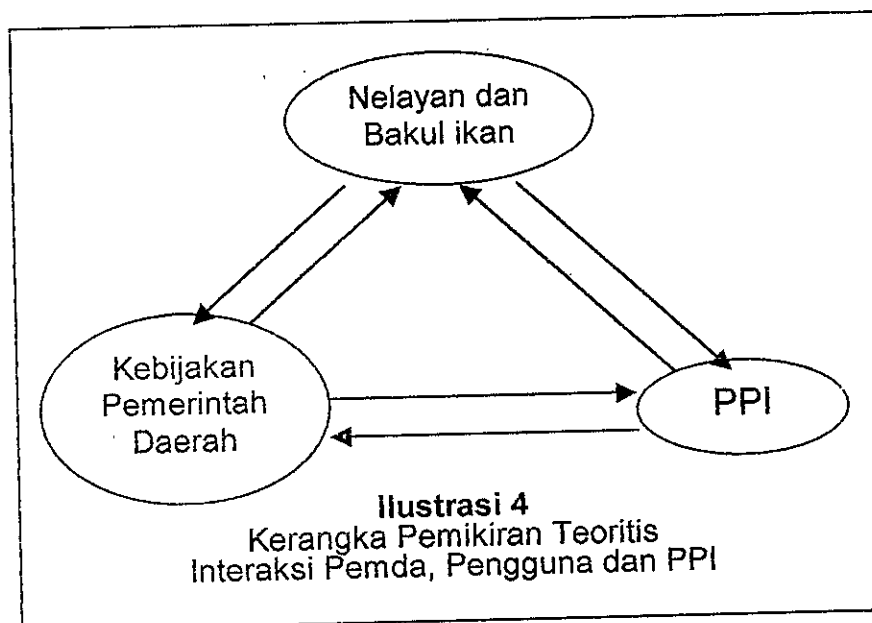
Tempat penelitian untuk menyusun tesis ini adalah di PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati. Disamping itu juga dilakukan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah, Kantor BPS Kabupaten Pati, Kantor BPS Propinsi Jawa Tengah maupun tempat-tempat lain yang berkaitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis interaksi antara Pemerintah Daerah, pengguna (nelayan dan bakul ikan) dan PPI tersaji pada Ilustrasi 4. Ilustrasi tersebut memberikan gambaran bahwa terjadinya interaksi memberikan dampak positif berupa pembinaan kepada masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi.



Interaksi antara Pemerintah dengan pengguna (Nelayan dan Bakul) menyangkut jumlah nelayan, jumlah bakul, jumlah perahu/kapal, jumlah alat tangkap, jumlah perahu/kapal yang masuk ke PPI, volume dan nilai produksi,

penyediaan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan nelayan dan bakul ikan. Interaksi antara organisasi PPI dengan nelayan dan bakul ikan diantaranya adalah kontribusi retribusi TPI dari nelayan sebesar 3% dan dari bakul ikan sebesar 2% yang dipungut melalui organisasi PPI, sedangkan organisasi PPI memberikan pelayanan pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah melalui pengorganisasian dan penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik dan memadai.

Interaksi Pemerintah dilakukan dengan serangkaian kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan dan penyediaan fasilitas di PPI seperti penyediaan fasilitas dasar, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang yang disediakan oleh pemerintah, sedangkan organisasi PPI mengelola fasilitas tersebut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna yang selanjutnya secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Berdasarkan kerangka teoritis interaksi antara pemerintah, PPI dan nelayan serta bakul ikan, maka PPI memiliki peranan yang penting sebagai pusat kegiatan perikanan laut, sumber PAD dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*).

2.2. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah

adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implikasinya kewenangan daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di daerahnya semakin luas. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah bahwa prakarsa untuk membuat perencanaan, pelaksanaan serta pembiayaan pembangunan harus banyak datang dari daerah yang bersangkutan. Para perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. (PAU-SE-UGM, 2000 : I-1).

Penerapan desentralisasi dalam wujud otonomi daerah menimbulkan suatu permasalahan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama dalam penyelenggaraan pemerintah (Sidik, 2000:1-4).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus pandai-pandai mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki guna menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerahnya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang diperoleh Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

2.3. Pengertian dan Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor : 604/Kpts/OT. 210/9/95 tertanggal 7 September 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan bahwa pelabuhan perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelas yakni : Pelabuhan Perikanan Samudera (Kelas A); Pelabuhan Perikanan Nusantara (Kelas B); Pelabuhan Perikanan Pantai (Kelas C), dimana ketiganya dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pelabuhan Perikanan Kelas D lazim disebut sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pengklasifikasian pelabuhan perikanan menjadi 4 tersebut didasarkan atas ketersediaan fasilitas untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna yang ada di pelabuhan perikanan yang bersangkutan, semakin besar kemampuan fasilitas untuk menampung dan memberikan pelayanan kepada para pengguna, akan semakin tinggi kelasnya.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan tempat bertambat dan labuh perahu/kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan merupakan lingkungan kerja ekonomi perikanan yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum dan jasa untuk memperlancar kegiatan perahu/kapal dan usaha perikanan. Lebih lanjut PPI merupakan salah satu unsur prasarana ekonomi yang dibangun dengan maksud untuk menunjang tercapainya pembangunan perikanan terutama untuk perikanan skala kecil. Mengingat peranan PPI sangat strategis, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional agar asset pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat nelayan dan pada

gilirannya akan dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah setempat (Direktorat Jenderal Perikanan, 1996/1997).

Sesuai dengan fungsinya, ruang lingkup kegiatan PPI dibedakan menjadi 3 (tiga) hal pokok, yakni :

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi meliputi : tambat labuh perahu/kapal perikanan; bongkar muat ikan hasil tangkapan; penyaluran perbekalan/logistik kapal dan awak kapal; serta pemeliharaan kapal dan alat-alat perikanan.
- b. Kegiatan yang berkaitan dengan pengawetan, pengolahan dan pemasaran meliputi : penanganan/handling hasil penangkapan; pelelangan ikan (bakul dan nelayan); pengepakan; penyaluran/distribusi; pengolahan; dan pengawetan.
- c. Kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan meliputi : penyuluhan dan pelatihan; pengaturan (keamanan, pengawasan dan perijinan); pengumpulan data statistik perikanan; serta pembinaan perkoperasian dan ketrampilan nelayan.

Ditinjau dari fungsinya, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan prasarana penangkapan yang diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat nelayan berskala usaha kecil dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perikanan, pengembangan wilayah, agribisnis dan agroindustri serta sebagai pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fasilitas yang tersedia di PPI terdiri dari fasilitas dasar (pokok), fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang Direktorat Jenderal Perikanan (1996/1997).

Fasilitas pokok suatu PPI meliputi : 1) alur pelayaran, 2) kolam pelabuhan, 3) bangunan penahan gelombang (break water), 4) dermaga/jetty, 5) turap penahan tanah, dan 6) jalan dalam kompleks. Sedangkan fasilitas fungsional adalah semua fasilitas yang dibangun untuk menunjang kelancaran operasional PPI meliputi : 1) gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 2) tangki BBM dan instalasinya, 3) tangki air beserta instalasinya, 4) instalasi listrik. 5) cold storage lengkap dengan unit pembekuan, 6) dock/slipway, 7) bengkel untuk kegiatan reparasi, 8) gedung-gedung untuk penanganan pengolahan, dan 9) tempat perbaikan/penjemuran jaring.

Fasilitas tambahan (penunjang) adalah semua fasilitas yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan operasional di lingkungan PPI, diantaranya meliputi :

1. Kantor administrasi (adpel, syahbandar, bea cukai, keamanan dan lain-lain)
2. Toko/warung serba ada (Waserda)
3. Balai pertemuan nelayan
4. Perumahan karyawan/mess operator
5. MCK umum
6. Sarana ibadah
7. Sarana kesehatan
8. Perumahan/pemukiman nelayan

9. Tempat penginapan nelayan
10. Saluran drainase dan fasilitas kebersihan lainnya
11. Fasilitas pembersih limbah kapal dan industri perikanan

Tersedianya fasilitas yang lengkap bagi suatu PPI diharapkan akan dapat operasional melayani masyarakat penggunanya. Volume dan kapasitas menampung jumlah kapal yang mendarat beserta muatannya tergantung dari tingkat pelayanan dan ukuran fasilitasnya. Namun demikian dari keseluruhan fasilitas tersebut di atas, fasilitas fungsional berupa gedung tempat pelelangan ikan merupakan fasilitas yang memiliki peran sangat penting. Hal ini disebabkan kedatangan kapal ke suatu PPI bermaksud untuk melelangkan ikan hasil tangkapannya, sehingga perlu disediakan luas lantai lelang yang memadai sesuai dengan kapasitas produksi ikan yang didaratkan di PPI yang bersangkutan. Daya tampung lantai lelang adalah seluas 15 m² untuk 1 ton ikan. Kondisi ini diasumsikan bahwa lantai lelang dapat digunakan paling tidak 2 kali proses pelelangan (Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jawa Tengah, 1997 : V-12).

Tugas pokok PPI melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan PPI dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 106 Tahun 1994, sebagai unit organisasi yang bersifat teknis operasional dan fungsional, PPI

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas yang menjadi atasannya.

Pemerintah daerah memiliki 4 (empat) peran penting dalam proses pembangunan (Blakely, 1991 : 69 dan Arsyad, 1999²) : 120) yakni sebagai *enterpreuneur*, koordinator, fasilitator dan stimulator. Peran *enterpreuneur* pemerintah mengandung maksud bahwa setiap kegiatan yang ditangani pemerintah perlu diperhitungkan manfaat dan keuntungan yang diperoleh pemerintah dan masyarakat umumnya. Sebagai koordinator pemerintah memiliki peran mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya sejak perencanaan, implementasi dan pemanfaatannya bersama masyarakat, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Peran stimulator pemerintah yaitu memberikan dorongan dan rangsangan kepada masyarakat agar bersama-sama melaksanakan pembangunan yang dikoordinasi oleh pemerintah.

Sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) diantaranya dengan menyediakan fasilitas publik yang tidak mungkin disediakan oleh pihak swasta seperti halnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). PPI merupakan salah satu lembaga yang setidaknya memiliki 3 (tiga) peranan cukup penting bagi pemerintah daerah maupun para pelaku ekonomi perikanan (Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah, 2001) yaitu :

- a. sebagai pusat kegiatan perikanan laut;

- b. sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD); dan
- c. sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka untuk menjalankan perannya PPI dilengkapi dengan berbagai fasilitas baik fasilitas dasar, fasilitas fungsional maupun fasilitas penunjang. Untuk mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki PPI agar bermanfaat bagi semua pihak secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya sebagai prasarana pelayanan umum (*public utilities*), PPI menitikberatkan pelayanan terhadap 4 (empat) aspek yaitu : aspek produksi; aspek pengolahan; aspek pemasaran; dan aspek pembinaan masyarakat nelayan (Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jawa Tengah, 1998 : 9-10).

2.3.1. Peran PPI sebagai pusat kegiatan perikanan laut

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) memiliki peran sebagai pusat kegiatan perikanan laut, artinya bahwa tempat tersebut digunakan sebagai tempat pembinaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat nelayan, tempat persiapan armada perikanan sebelum bertolak menuju ke daerah penangkapan (*fishing ground*) dan sebagai tempat pendaratan setelah melakukan kegiatan penangkapan di laut. Persiapan armada perikanan meliputi penyediaan perbekalan, perbaikan armada beserta kelengkapannya. Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dan sekaligus memasarkan/melelangkannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai salah satu fasilitas fungsional yang dimiliki oleh PPI.

Sebagai pusat kegiatan perikanan laut, keberadaan PPI Bajomulyo dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan kegiatan perikanan laut memiliki keterkaitan (*linkage*) yang cukup panjang dengan kegiatan yang lain, baik kegiatan yang terkait kebelakang (*backward linkage*) maupun kegiatan yang terkait ke depan (*forward linkage*). Penyediaan kesempatan kerja merupakan sesuatu hal yang strategis, karena dengan adanya kesempatan kerja akan berdampak positif terhadap pembangunan yakni peningkatan pendapatan masyarakat.

PPI pada umumnya juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan. Pembinaan tersebut terutama diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan beserta keluarganya. Lebih lanjut PPI juga berfungsi sebagai tempat memperoleh data yang berkaitan dengan perikanan laut. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat di suatu PPI akan dapat membantu memberikan informasi kepada para ahli yang akan melakukan analisis kondisi perikanan laut dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, dengan demikian akan diperoleh hasil analisis yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pejabat penentu kebijakan.

2.3.2. Peran PPI sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD)

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dominan sebagai penerimaan pemerintah daerah terutama berasal dari penerimaan pajak

daerah dan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar kemampuan daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah, semakin mampu daerah yang bersangkutan untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan pembangunan daerahnya dan semakin kecil ketergantungannya terhadap pemerintahan di atasnya.

Anggaran belanja pemerintah daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota diperoleh dari beberapa sumber diantaranya adalah pendapatan asli daerah dan salah satunya melalui pungutan retribusi TPI. Sebagai sumber pendapatan daerah (PAD), TPI/PPI dan pelabuhan perikanan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pemerintah daerah baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Di Jawa Tengah pengelolaan retribusi dari pemanfaatan infrastruktur tersebut dituangkan dan diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan. Dalam Perda 3/1999 tersebut diantaranya diatur tentang besarnya retribusi yang dipungut dari masyarakat pengguna (*user*) baik dari nelayan maupun dari bakul ikan.

Fasilitas dasar, fasilitas fungsional maupun fasilitas penunjang yang tersedia secara baik dan memadai dengan pelayanan yang baik merupakan salah satu daya tarik bagi armada perikanan dari daerah lain untuk memasarkan/melelangkan hasil tangkapannya. Infrastruktur yang dibangun di suatu lokasi tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan setempat, akan tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat nelayan dari daerah lain.

Hal ini berarti bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan akan semakin banyak armada perikanan yang melelangkan hasil tangkapannya di daerah tertentu yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi TPI.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 yang dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000, besarnya pungutan retribusi TPI ditetapkan sebesar 5% yang dipungut dari nelayan sebesar 3% dan dari bakul sebesar 2% dari nilai hasil lelang hasil tangkapan. Penggunaan secara rinci hasil pungutan retribusi TPI tersebut adalah sebagai berikut :

- a. 0,90% disetor ke Kas Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- b. 0,95% disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten/Kota dimana TPI berada;
- c. 3,15% disetor ke Rekening PUSKUD Mina Baruna yang digunakan untuk :
 - (1) 1,65% dikelola PUSKUD Mina Baruna penggunaannya adalah :
 - 0,80% untuk biaya penyelenggaraan lelang.
 - 0,10% untuk biaya perawatan TPI.
 - 0,50% untuk dana paceklik nelayan.
 - 0,15% untuk dana asuransi nelayan.
 - 0,10% untuk pengembangan PUSKUD Mina Baruna.
 - (2) 1,50% dikelola KUD Mina setempat yang penggunaannya diatur :
 - 0,50% untuk tabungan nelayan.
 - 0,25% untuk tabungan bakul.
 - 0,45% untuk dana sosial dan kecelakaan laut.
 - 0,30% untuk pengembangan KUD Mina setempat.

Jika dilihat perincian tersebut di atas, maka pungutan retribusi TPI di Jawa Tengah telah menggambarkan azas keadilan. Hal ini terlihat dari alokasi pungutan tersebut sebagian besar dikembalikan lagi kepada pengguna (*user*) dalam bentuk lain. Sebagian pungutan yang dikelola PUSKUD Mina Baruna digunakan sebagai penyeimbang atau subsidi silang bagi TPI yang berskala kecil dan tidak mampu mengelola TPI dengan dananya sendiri. Sedangkan pungutan yang dialokasikan di Pemerintah Propinsi digunakan untuk menangani kegiatan lintas Kabupaten/Kota maupun lintas Propinsi.

2.4. Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang disediakan di setiap Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dengan demikian TPI merupakan bagian pengelolaan dari PPI. Fasilitas lain yang disediakan oleh PPI diantaranya adalah fasilitas dasar seperti dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran serta fasilitas penunjang seperti gudang, MCK, keamanan dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan, bahwa yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat para

penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Ikan hasil tangkapan para nelayan harus dijual di TPI kecuali : 1) ikan yang digunakan untuk keperluan lauk pauk keluarga, hasil olah raga dan penelitian; 2) ikan jenis tertentu yang diekspor dan ikan hasil tangkapan pola kemitraan dengan pertimbangan dan atas dasar persetujuan dari Kepala Daerah.

Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi Pemerintah Kabupaten Pati memiliki arti yang sangat penting karena PPI memiliki peran yang sangat penting bagi suatu daerah. PPI bukan hanya sebagai pusat kegiatan perikanan laut akan tetapi juga sebagai sumber PAD dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*) (Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah, 2001).

Menurut Kuncoro (1995:16-17) bahwa proporsi PAD yang rendah membuat ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat yang disebabkan oleh (1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; (2) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang per-pajakan; (3) pajak daerah cukup beragam tetapi hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan; (4) adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme; dan (5) kelemahan dana pemberian subsidi.

2.5. Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa komponen pendapatan asli daerah (PAD) meliputi (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah (3) hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak untuk dijadikan sebagai obyek retribusi.

Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yakni jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan. Jasa usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.

UPT-PUSTAKA-INDO

2.6. Teori Basis Ekonomi

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemajuan dan pertumbuhan pembangunan di suatu daerah adalah nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Nilai PDRB menggambarkan jumlah nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah/daerah pada kurun waktu tertentu (biasanya dihitung pada periode waktu 1 tahun).

Teori basis merupakan hal yang lazim di bidang ekonomi pembangunan, teori ini juga dapat diterapkan pada bidang ilmu yang lain seperti halnya perikanan. Teori basis menjelaskan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor (konsumen luar daerah) akan menghasilkan kekayaan bagi daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) (Arsyad, 1999b:300). Penggunaan teori ini dalam studi empirik dimaksudkan sebagai upaya untuk mengidentifikasi sektor-sektor pembangunan yang termasuk dalam sektor basis, artinya bahwa sektor yang bersangkutan memiliki kemampuan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang lain terhadap pembangunan suatu daerah.

Untuk mengetahui kemampuan suatu sektor di suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis *location quotient*. Yusuf (1999:213-233) menjelaskan bahwa analisis *location quotient* sering digunakan untuk

melihat deskripsi kegiatan ekonomi (sektor) yang potensial. Pada dasarnya analisis tersebut memiliki kriteria kontribusi yaitu untuk melihat seberapa besar kontribusi suatu kegiatan (sektor) dalam wilayah studi dibandingkan dengan wilayah referensi. Lebih lanjut Arsyad (1999²):141) menjelaskan pula bahwa untuk keperluan identifikasi kemampuan suatu sektor digunakan analisis *location quotient (LQ)* yaitu usaha mengukur konsentrasi suatu kegiatan (sektor) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dengan peranan kegiatan (sektor) yang sama dalam perekonomian regional atau nasional.

2.7. Analisa Kemampuan Sektor

Kemampuan pembangunan di suatu daerah pada dasarnya sangat dipengaruhi dan erat kaitannya dengan perencanaan yang disusun oleh daerah yang bersangkutan dan konsistensi dari implementasi perencanaan tersebut. Semakin baik tingkat kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya, maka akan semakin baik pula hasil pembangunan yang dapat dicapai.

Sektor yang potensial di suatu daerah merupakan sektor yang memiliki kemampuan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan sektor yang sama di daerah lain, dengan demikian produk dan jasa dari sektor potensial tersebut di samping dapat mencukupi kebutuhan

daerah sendiri, selebihnya dapat dijual ke luar daerah. Dengan kelebihan produk dan jasa yang dapat dijual ke luar daerah, maka daerah yang bersangkutan memperoleh pendapatan yang masuk dari daerah lain. Aliran arus pendapatan dari luar daerah tentunya akan dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya yang ada dan menggerakkan sektor potensial tersebut. Lebih lanjut karena adanya keterkaitan (*linkage*) antar sektor, maka sektor lain yang kurang potensialpun akan terdorong untuk berkembang dan pada akhirnya masing-masing sektor akan merupakan pasar bagi sektor yang lain serta dapat menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja baru bagi masyarakat.

Terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja yang memadai baik dari segi jumlah, jenis dan kualitas sesuai dengan kemampuan masyarakat niscaya akan meningkatkan *out put* daerah, pendapatan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi jumlah masyarakat miskin. Lebih jauh kondisi masyarakat yang taraf hidupnya tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat melalui kebijakan dan peraturan fiskal yang berlaku seperti pajak, retribusi, ijin dan lain-lain yang selanjutnya merupakan sumber dana bagi pembiayaan pembangunan selanjutnya.

2.8. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi atau daya guna adalah besarnya bagian dari hasil pajak atau retribusi yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak/retribusi yang bersangkutan. Efektivitas mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak/retribusi dengan potensi atau target yang harus dicapai, yang dalam hal ini diasumsikan bahwa semua wajib pajak/wajib retribusi membayar pajak/retribusi yang menjadi kewajibannya. Efektivitas menunjukkan pada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan (*objectives*). Oleh karena itu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci sehingga pengukurannya dapat lebih bermanfaat dan bermakna (Devas, 1987).

Berdasarkan standardisasi yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri (Wasirin, 2000), bahwa ukuran efektif tidaknya suatu hasil pungutan pajak/retribusi adalah sebagai berikut :

- a. hasil yang diperoleh diantara 40% - 60% berarti tidak efektif;
- b. hasil yang diperoleh diantara 60% - 80% berarti cukup efektif;
- c. hasil yang diperoleh diantara 80% - 100% berarti efektif;
- d. hasil yang diperoleh >100% berarti sangat efektif.

Sidik (1994) dalam Wasirin (2000) menjelaskan bahwa semakin besar tingkat efektivitasnya menunjukkan hasil yang semakin efektif terhadap target yang diperoleh, sebaliknya semakin kecil tingkat efektivitasnya menunjukkan semakin tidak efektif pelaksanaan pungutan retribusi terhadap pencapaian targetnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Materi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan data primer berupa data jumlah kapal yang mendarat, volume dan nilai produksi ikan yang dilelangkan, jumlah kegiatan usaha yang terkait dan penyerapan tenaga kerjanya dan retribusi TPI di PPI Bajomulyo. Penyerapan tenaga kerja tidak langsung terdiri atas tenaga kerja yang diserap oleh kegiatan yang ada keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun dan tenaga kerja yang diserap oleh kegiatan yang ada keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dengan kegiatan di PPI Bajomulyo. Di samping itu diperlukan juga data sekunder berupa PDRB sektor perikanan di PPI Bajomulyo, PDRB Kabupaten Pati dan Propinsi Jawa Tengah. Data sebagai materi penelitian tersebut mencakup periode waktu 5 tahun dari 1996 sampai dengan 2000.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode observasi langsung yang dipandu dengan kuisisioner (daftar pertanyaan) dan didukung dengan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan wawancara langsung dengan berbagai sumber seperti nelayan, bakul, Kepala TPI maupun karyawan TPI. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan seperti Kantor PPI Bajomulyo, KUD Sarono Mino Pati, Dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Pati, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Pati serta BPS Propinsi Jawa Tengah. Data yang diperoleh dengan metode penelitian tersebut di atas selanjutnya disusun atau dikompilasi untuk diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian diawali dari studi pustaka dilanjutkan dengan pengambilan data sekunder meliputi variabel data jumlah kapal yang mendarat, jumlah nelayan dan bakul ikan, PDRB, volume dan nilai produksi perikanan di PPI Bajomulyo maupun Kabupaten Pati serta tingkat Propinsi Jawa Tengah, target, realisasi dan biaya pemungutan penerimaan retribusi TPI Bajomulyo maupun Kabupaten Pati serta data realisasi PAD Kabupaten Pati. Di samping itu juga diperlukan variabel data penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan keberadaan PPI Bajomulyo.

Definisi operasional tentang variabel dan cara penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kemampuan/peranan kontribusi sektor/sub sektor perikanan di PPI Bajomulyo merupakan salah satu cara untuk mengetahui hubungan antar sektor/sub sektor lain di Kabupaten Pati. Diketuinya kemampuan sektor/sub sektor perikanan di PPI Bajomulyo merupakan hal penting sebagai bahan analisis lebih lanjut dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah.

2. Untuk mengetahui rasio pertumbuhan di wilayah studi (RPs) yakni di PPI Bajomulyo dibandingkan dengan Kabupaten Pati adalah laju pertumbuhan sektor/sub sektor perikanan laut di masing-masing wilayah. Dengan diketahuinya nilai RPs di PPI Bajomulyo dapat diketahui perbandingan sektor/sub sektor perikanan di tingkat Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo diperlukan variabel data target dan realisasi penerimaan retribusi TPI di PPI Bajomulyo, sedangkan pengukuran tingkat efisiensi diperlukan variabel data total biaya pungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo dan realisasi penerimaan retribusi TPI di PPI Bajomulyo. Dengan variabel data tersebut dapat diketahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi pungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo.
4. Untuk mengetahui peranan PPI Bajomulyo sebagai pusat kegiatan perikanan laut ditinjau dari tingkat besarnya penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung diperlukan variabel data jumlah nelayan, bakul ikan, pengolah ikan, tenaga angkut ikan, penyedia perbekalan, pengolah, pengangkut, pengeksport dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan di PPI Bajomulyo.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka, dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang dapat mendukung penelitian dan penulisannya yang berasal dari berbagai jenis literatur, penulisan ilmiah maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam penyusunan laporan penelitian.
2. Penelitian lapangan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder sesuai dengan variabel yang diperlukan. Data tersebut dapat diperoleh di PPI Bajomulyo, BPS Kabupaten Pati, BPS Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah serta instansi/lembaga lain.

3.4. Alat Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya data ditabulasikan sesuai keperluan agar lebih mudah untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, maka data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif, sedangkan analisis

Aziz (1994:231-233) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menganalisis perkembangan pembangunan adalah dengan mengamati perkembangan *Location Quotient (LQ)*, yaitu suatu indikator sederhana yang menunjukkan "kekuatan" atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah referensi. Sektor yang mempunyai nilai *LQ* di atas satu merupakan sektor "kuat", sehingga daerah yang bersangkutan secara potensial merupakan pengeksportir sektor tersebut ke daerah lain, sebaliknya suatu daerah merupakan pengimpor produk suatu sektor

Untuk mengetahui kemampuan suatu sektor di suatu daerah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sektor potensial yang ada, Analisis *Location Quotient (LQ)* sering digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan (sektor) yang potensial. Pada dasarnya analisis tersebut digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi suatu kegiatan (sektor/sub sektor) dalam wilayah studi dibandingkan dengan kegiatan (sektor/sub sektor) sejenis di wilayah referensi (Yusuf, 1999:213-233).

3.4.1. Analisis *location quotient (LQ)*

dijelaskan sebagai berikut:

data secara kuantitatif dilakukan dengan beberapa alat analisis. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka beberapa alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah alat analisis *Location Quotient (LQ)*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), efektifitas dan efisiensi yang masing-masing dapat

tertentu jika nilai *LQ*-nya berada di bawah satu. Secara matematis pendekatan *Location Quotient (LQ)* dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{X_{is} : RV_{ts}}{X_{ir} : RV_{tr}} \dots\dots\dots(3.1)$$

dimana : X_{is} = Nilai tambah bruto sektor *i* di wilayah studi

X_{ir} = Nilai tanbah bruto sektor *i* di wilayah referensi

RV_{ts} = Total nilai tambah bruto sektor di wilayah studi

RV_{tr} = Total nilai tambah bruto sektor di wilayah referensi

Kriteria untuk menentukan dan menginterpretasikan nilai *LQ* sebagaimana dijelaskan Bendavid-Val (1991:74) sebagai berikut :

1. Nilai $LQ > 1$, kemampuan sektor/subsektor yang bersangkutan terhadap PDRB lebih besar dibandingkan kemampuan rata-rata sektor/sub sektor sejenis di wilayah referensi, sehingga merupakan sektor/sub sektor potensial;
2. Nilai $LQ = 1$, kemampuan kontribusi sektor/sub sektor yang bersangkutan sama dengan kemampuan di wilayah referensi, sehingga hanya dapat mencukupi kebutuhan di dalam daerahnya;
3. Nilai $LQ < 1$, kemampuan konstribusi sektor/sub sektor yang bersangkutan lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan sektor/sub sektor sejenis di wilayah referensi, sehingga bukan merupakan sektor potensial.

3.4.2. Analisis model rasio pertumbuhan (MRP)

Untuk memperkuat hasil analisis *location quotient* (LQ), maka dilakukan analisis model rasio pertumbuhan dengan cara melakukan *overlay* antara hasil analisis LQ dengan hasil analisis RPs. Yusuf (1999:219-233) telah melakukan modifikasi analisis Shift Share dan Location Quotient yang dinyatakan sebagai **Model Rasio Pertumbuhan (MRP)**. Terdapat dua rasio pertumbuhan dalam analisis tersebut, yaitu : (1) rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) dan (2) rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPR). Sesuai dengan tujuan penelitian digunakan RPs yaitu perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan sub sektor perikanan laut di wilayah studi (PPI Bajomulyo) dengan laju pertumbuhan kegiatan sub sektor yang sama di wilayah referensi (Propinsi Jawa Tengah), yang diformulasikan berikut :

$$RPs = \frac{\Delta E_{ij} : E_{ij}(t)}{\Delta E_{iR} : E_{iR}(t)} \dots\dots\dots(3.2)$$

dimana : ΔE_{ij} = perubahan pendapatan kegiatan (sektor/sub sektor) *i* di wilayah studi pada periode *t*.

ΔE_{iR} = perubahan pendapatan kegiatan (sektor/sub sektor) *i* di wilayah referensi.

E_{ij} = pendapatan kegiatan (sektor/sub sektor) *i* di wilayah studi.

E_{iR} = pendapatan kegiatan (sektor/sub sektor) *i* di wilayah referensi.

Untuk mendapatkan deskripsi sektor/sub sektor potensial di suatu wilayah, perlu dilakukan *overlay* antara nilai rasio pertumbuhan di wilayah studi (RPs) dan nilai Location Quotient (LQ), sehingga dapat diperoleh kombinasi antara kriteria kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah sektor/sub sektor dalam komponen pembentukan PDRB sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1.
Deskripsi Overlay Nilai LQ dan RPs, Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

No	LQ	RPs	Deskripsi	Skore
1.	(+)	(+)	Sektor/sub sektor yang bersangkutan dominan kontribusi maupun pertumbuhan (Sangat Potensial).	4
2.	(-)	(+)	Sektor/sub sektor yang bersangkutan kontribusinya kecil, tetapi dominan pertumbuhan (Potensial)	3
3.	(+)	(-)	Sektor/sub sektor yang bersangkutan kontribusinya dominan, akan tetapi pertumbuhannya kecil (Cukup Potensial)	2
4.	(-)	(-)	Sektor/sub sektor yang bersangkutan kontribusi maupun pertumbuhannya kecil (Tidak Potensial)	1

Sumber : Modifikasi dari Yusuf, 1999.

Jika suatu sektor/sub sektor memiliki dominan kontribusi maupun pertumbuhannya, maka diberikan skor 4 dengan kriteria "*Sangat Potensial*" karena disamping dapat mencukupi kebutuhan dalam daerah sendiri dan menjual ke luar daerah, sektor/sub sektor tersebut juga memiliki pertumbuhan yang positif. Sedangkan jika kontribusinya kecil akan tetapi pertumbuhannya positif, maka diberikan skor 3 dengan kriteria "*Potensial*", karena walaupun untuk mencukupi kebutuhan di dalam daerah sendiri saja belum cukup tetapi memiliki prospek yang baik dengan diindikasikan pertumbuhannya yang positif, sehingga suatu saat nanti kontribusinya akan dapat menjadi positif.

Pada sektor/sub sektor yang memiliki kontribusi dominan tetapi pertumbuhannya kecil diberikan skor 2 dengan kriteria "*Cukup Potensial*" karena walaupun dapat mencukupi kebutuhan di dalam daerah sendiri, sektor/sub sektor tersebut kurang prospektif yang diindikasikan dengan pertumbuhan yang negatif sehingga suatu saat nanti kontribusinya akan menjadi negatif. Sedangkan pada sektor/sub sektor yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang kecil merupakan sektor/sub sektor yang tidak dapat diharapkan, sehingga diberikan skor 1 dengan kriteria "*Tidak Potensial*".

3.4.3. Analisis efektivitas dan efisiensi

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas PPI Bajomulyo sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan, dapat dilakukan dengan analisis efektivitas. Nilai efektivitas dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi TPI di PPI Bajomulyo dengan target penerimaan retribusi TPI di PPI bajomulyo dikalikan 100% yang secara matematis dapat diformulasikan berikut.

$$Ek = \frac{RRTPI}{TRTPI} \times 100\% \dots\dots\dots(3.3.)$$

- dimana* : Ek = efektivitas pungutan retribusi TPI
 RRTPI = realisasi penerimaan retribusi TPI
 TRTPI = target penerimaan retribusi TPI

Standardisasi yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri (Wasirin, 2000), bahwa ukuran efektif tidaknya suatu hasil pungutan pajak/retribusi adalah sebagai berikut :

- a. hasil yang diperoleh diantara 40% - 60% berarti tidak efektif;
- b. hasil yang diperoleh diantara 60% - 80% berarti cukup efektif;
- c. hasil yang diperoleh diantara 80% - 100% berarti efektif;
- d. hasil yang diperoleh >100% berarti sangat efektif.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam pemungutan retribusi TPI dapat dilakukan dengan membandingkan antara total biaya pungut retribusi TPI di PPI Bajomulyo dengan realisasi penerimaan retribusi TPI di PPI Bajomulyo sebagaimana diformulasikan berikut :

$$Ef = \frac{RPRTPI}{TBRTPI} \times 100\% \dots\dots\dots(3.4.)$$

dimana : Ef = efisiensi pungutan retribusi TPI

RPRTPI = realisasi penerimaan retribusi TPI

TBRTPI = total biaya pungut retribusi TPI

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian sebagai bahan penyusunan tesis terdiri dari beberapa variabel sesuai dengan tujuan penelitian. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana telah disebutkan di depan.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan salah satu unsur prasarana ekonomi yang dibangun dengan maksud untuk menunjang tercapainya pembangunan perikanan terutama untuk perikanan skala kecil. Ketersediaan fasilitas di suatu PPI merupakan hal penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna.

Ketersediaan fasilitas pelayanan di lingkungan PPI Bajomulyo didukung oleh KUD Sarono Mino Kabupaten Pati melalui beberapa unit usahanya yang menyediakan : Waserda, Air tawar, SPBU, Dok dan lain sebagainya. Disamping itu di sekitar lokasi juga berkembang kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran kegiatan usaha penangkapan ikan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa fasilitas yang ada di PPI Bajomulyo meliputi fasilitas dasar, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang dapat disampaikan sebagaimana Tabel 2 berikut

Tabel 2.
Ketersediaan Fasilitas di PPI Bajomulyo
Tahun 2000

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kondisi	Ket.
A.	Fasilitas Dasar :			
1.	Luas Tanah	30.000 m ²	Baik	
2.	Lebar Alur pelayaran	80 m	Baik	
3.	Kedalaman Alur Plyr.	7 m	Baik	
4.	Kedalaman Muara	2 m	Pendangkalan	
5.	Dermaga	Beton 500 m	Baik	
6.	Turap Penahan Tanah	1.876 m	Baik	
7.	Jalan Dalam Komplek	Ada	Baik	
B.	Fasilitas Fungsional :			
1.	Gegung TPI	2.950 m ²	Baik	
	- Lantai Lelang	2.800 m ²	Baik	
	- Kantor PPI	150 m ²	Baik	
2.	BBM dan instalasinya	Ada SPBU	Baik	
3.	Air tawar dan instalasi	Ada Artetis	Baik	
4.	Instalasi listrik	1.300 watt	Baik	
5.	Dok/slipway	Ada (KUD)	Kurang Memadai	
6.	Bengkel/Reparasi	Ada (KUD)	Kurang Memadai	
C.	Fasilitas Penunjang :			
1.	Kantor administrasi	150 m ²	Baik	
2.	Toko/Waserda	Ada (KUD)	Baik	
3.	Balai Temu Nelayan	100 m ²	Baik	
4.	Perumahan karyawan	Tidak ada	-	
5.	MCK umum	24 m ²	Baik	
6.	Sarana ibadah	24 m ²	Baik	
7.	Pemukiman nelayan	Ada	Baik	
8.	Penginapan nelayan	Tidak ada	-	
9.	Drainase dan sanitasi	Ada	Baik	
10.	Gedung Pengepakan	180 m ²	Baik	

Sumber : Hasil penelitian di PPI Bajomulyo, 2001

Ketersediaan fasilitas yang cukup memadai di PPI Bajomulyo tersebut menjadikan salah satu daya tarik kapal-kapal perikanan baik dari daerah sendiri maupun dari luar daerah untuk mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Bajomulyo. Perkembangan jumlah kapal yang mendarat di PPI Bajomulyo selama 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Jumlah Kapal Yang Mendarat di PPI Bajomulyo
Tahun 1996 – 2000

No	Tahun	Jumlah Kapal Yang Mendarat			Perubahan (%)		
		Lokal	Pendatang	Jumlah	Lokal	Pendatang	Jumlah
1.	1996	605 unit	929 unit	1.534 unit	7,46	13,02	10,76
2.	1997	672 unit	786 unit	1.458 unit	11,07	-15,39	-4,95
3.	1998	780 unit	649 unit	1.429 unit	16,07	-17,43	-1,99
4.	1999	721 unit	520 unit	1.241 unit	-7,56	-19,88	-13,16
5.	2000	748 unit	492 unit	1.240 unit	3,74	-5,38	-0,08

Sumber : Hasil Penelitian di PPI Bajomulyo, 2001

Berkembangnya jumlah kapal yang mendarat di PPI Bajomulyo dimulai sejak 1984 pada saat muara sungai Juana dikeruk, sehingga memungkinkan kapal-kapal yang berukuran 100 GT dapat masuk ke alur pelayaran tersebut. Namun demikian pada tahun-tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan jumlah kapal yang mendarat, terutama kapal-kapal yang berasal dari luar daerah. Terjadinya penurunan jumlah kapal yang mendarat yang berasal dari luar daerah (pendatang) dimungkinkan karena diwilayahnya sendiri telah disediakan fasilitas PPI yang memadai dan kesadaran untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerahnya sendiri atau mengalami kerusakan yang tak mampu diperbaiki karena krisis ekonomi. Sedangkan penurunan jumlah kapal yang mendarat yang berasal dari daerah sendiri (lokal) diakibatkan oleh kerusakan karena usia yang tak mampu diperbaiki akibat adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan biaya tinggi, sehingga jumlah kapal yang ada menjadi berkurang.

Kapal yang mendarat dan melelangkan hasil tangkapannya di PPI Bajomulyo baik yang berasal dari kapal setempat maupun kapal pendatang, menggunakan berbagai jenis alat tangkap. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal lokal adalah purse seine, mini bottom long line, cantrang, jaring cumi-cumi dan lain-lain, sedangkan kapal mendatang hanya menggunakan alat tangkap purse seine. Volume produksi perjenis alat tangkap di PPI Bajomulyo 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Volume Produksi Per-jenis Alat Tangkap
Di PPI Bajomulyo Tahun 1996 – 2000

No	Tahun	Volume Produksi Per-Jenis Alat Tangkap (kg)				
		Purse Seine	Mini Bottom Long Line	Cantrang	Jaring Cumi-cumi	Jumlah
1.	1996	53.574.097	3.081.212	-	-	56.655.309
2.	1997	53.392.167	3.400.683	-	-	56.792.850
3.	1998	46.959.455	4.047.217	-	-	51.006.672
4.	1999	34.531.267	2.513.689	2.815.566	-	39.860.522
5.	2000	31.504.905	2.315.996	1.248.059	10.195	35.079.155

Sumber : Hasil Penelitian di PPI Bajomulyo, 2001

Perkembangan dan hubungan antara variabel antara dua wilayah yang dibandingkan ditentukan oleh kemampuan sektor/sub sektor yang bersangkutan ditinjau dari kontribusi maupun pertumbuhannya. Profil perkembangan nilai produksi di PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati dan Jawa Tengah yang mencerminkan nilai tambah bruto atau PDRB kegiatan (sektor) perikanan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Laut
Di PPI Bajomulyo, Kabupaten Pati dan Jawa Tengah 1996-2000

Tahun	PPI Bajomulyo		Kabupaten Pati		Propinsi Jawa Tengah	
	Nilai/Raman (Rp.000)	Perubah- an (%)	Nilai/Raman (Rp.000)	Perubah- an (%)	Nilai/Raman (Rp.000)	Perubah- an (%)
1996	49.077.439,9	23,13	66.819.181,0	23,58	296.189.192,5	19,89
1997	52.263.618,5	6,49	85.988.373,0	28,69	351.208.050,0	18,58
1998	113.941.567,6	118,01	160.434.191,0	86,58	730.235.200,0	107,92
1999	98.032.039,7	-13,96	104.246.440,3	-35,02	558.574.333,9	-23,51
2000	91.916.527,0	6,24	101.393.482,8	-2,75	584.600.037,0	4,66

Sumber : Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah, Perikanan Jawa Tengah Dalam Angka 1996-2000

Berdasarkan data pada Tabel 5. nilai raman tertinggi baik tingkat Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati maupun PPI Bajomulyo terjadi pada tahun 1998. Kondisi ini memberikan petunjuk bahwa pada 1998 tingkat harga ikan sangatlah tinggi dibanding tahun-tahun lainnya, dimana pada saat itu krisis ekonomi di negara kita pada puncaknya, sehingga harga barang-barang sangatlah mahal dan komoditas perikanan pada saat itu oleh masyarakat masih dianggap cukup terjangkau.

Perkembangan total nilai tambah bruto sebagai salah satu variabel untuk mengukur peranan/kemampuan sektor/sub sektor perikanan laut di PPI Bajomulyo adalah total nilai PDRB Kabupaten Pati dan Jawa Tengah yang berasal dari seluruh sektor selama kurun waktu 5 tahun disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6.
Perkembangan Total Nilai PDRB (ADHB)
Kabupaten Pati dan Propinsi Jawa Tengah 1996-2000

No	Tahun	Kabupaten Pati		Propinsi Jawa Tengah	
		Nilai PDRB (Rp.000)	Pertum- buan (%)	Nilai PDRB (Rp.000)	Pertum- buan (%)
1.	1996	1.264.390.790	12,60	52.505.360.000	12,71
2.	1997	1.426.428.670	12,82	60.296.430.000	14,84
3.	1998	2.092.501.350	46,70	84.610.220.000	40,32
4.	1999	2.257.534.980	7,89	101.509.190.000	19,97
5.	2000	2.521.652.894	11,70	118.404.890.000	16,64

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, Pendapatan Regional Jawa Tengah 1996-2000 dan BPS Kabupaten Pati, Pendapatan Regional Kabupaten Pati 1996-2000

Penerimaan retribusi TPI dari PPI Bajomulyo kepada Pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 sebesar 1 % dari nilai raman mencakup penerimaan tahun 1996 dan 1997. Untuk penerimaan retribusi TPI untuk Pemerintah Kabupaten Pati pada 1998 dan 1999 berlaku Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota hanya menerima 0,40%. Perkembangan selanjutnya diterbitkan perubahan Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000, dimana dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagian retribusi sebesar 0,95% dari nilai raman.

Profil perkembangan target, realisasi dan jumlah biaya pemungutan penerimaan retribusi TPI di PPI Bajomulyo sebagai variabel

untuk mengukur tingkat efektivitas pungutan retribusi TPI dan jumlah biaya pemungutan retribusi TPI dengan realisasi penerimaan retribusi TPI sebagai variabel untuk mengukur tingkat efisiensi disajikan pada Tabel 7.

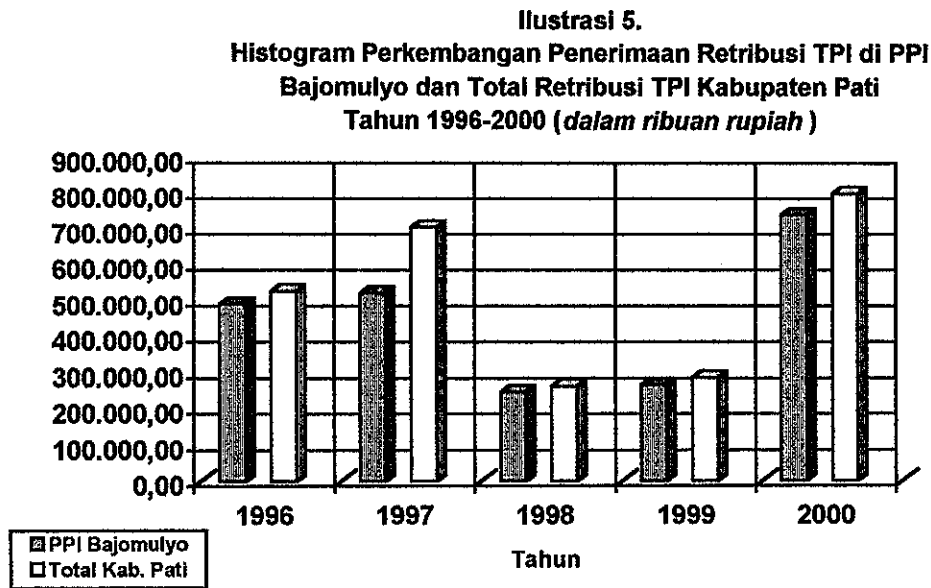
Tabel 7.
Perkembangan Target, Realisasi Penerimaan dan Jumlah Biaya Pemungutan Retribusi TPI Di PPI Bajomulyo Kab. Pati 1996-2000

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Biaya Operasional PPI (Rp)
1.	1996	500.000.000,00	490.774.400,00	458.296.200,43
2.	1997	550.000.000,00	522.636.200,00	513.136.371,66
3.	1998	750.000.000,00	247.983.468,00	602.213.187,14
4.	1999	300.000.000,00	267.286.369,00	617.473.514,54
5.	2000	300.000.000,00	740.157.278,00	571.735.250,00

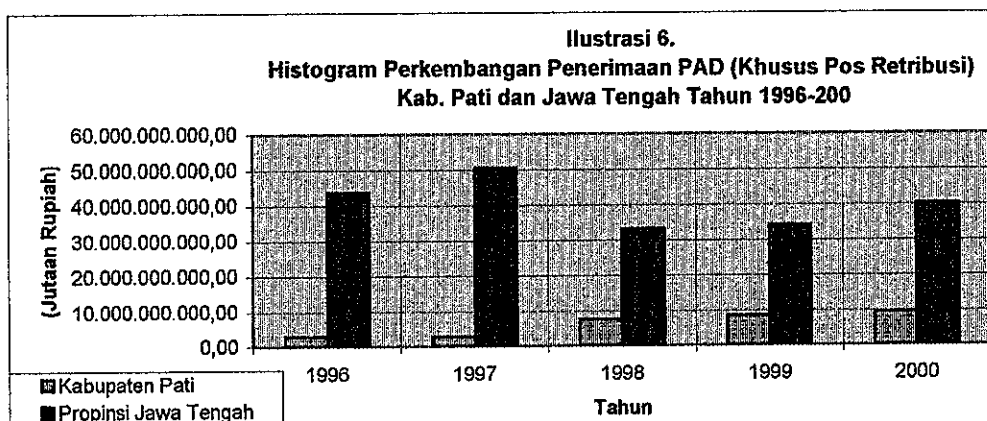
Sumber : PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati dan PPI Bajomulyo.

Rendahnya realisasi penerimaan retribusi TPI pada tahun 1998 dan 1999 diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan fiskal dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diikuti oleh Inmendagri Nomor 8, 9 dan 10, sehingga pungutan retribusi daerah menjadi berubah dan pada tahun tersebut merupakan masa transisi yang cukup sulit. Perkembangan penerimaan retribusi TPI dari PPI Bajomulyo, total retribusi TPI Kabupaten Pati dan retribusi TPI total Jawa Tengah secara rinci disajikan pada Lampiran 3. Perkembangan Penerimaan Retribusi TPI dari PPI

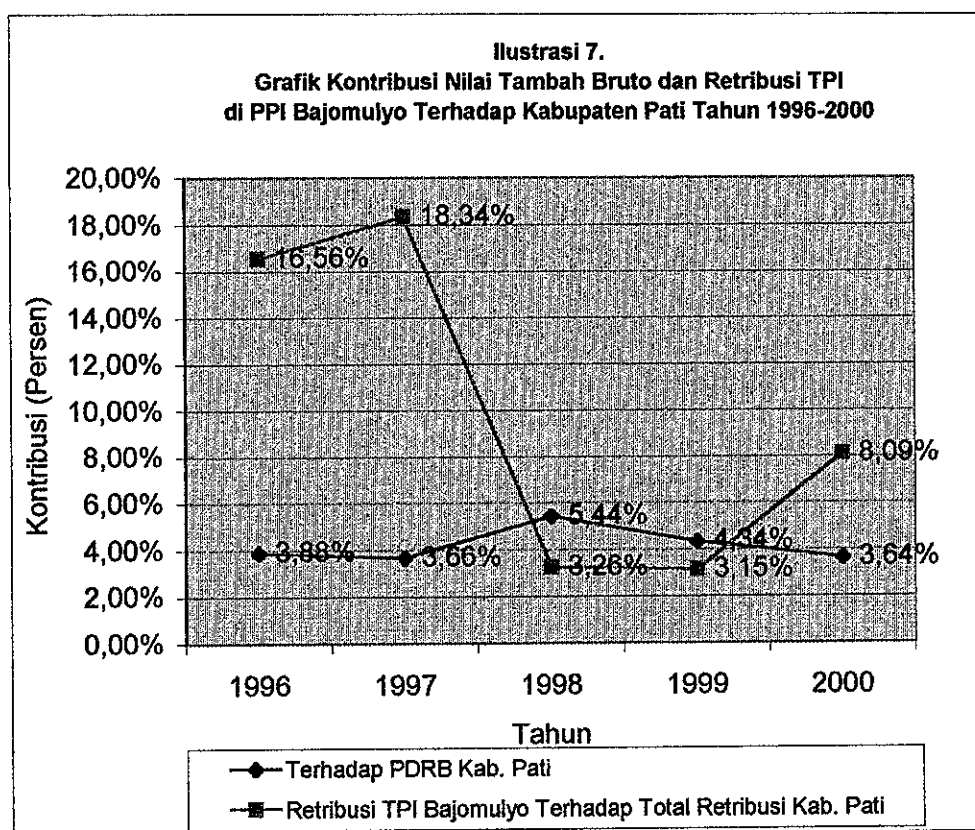
Bajomulyo, Total Retribusi TPI Kabupaten Pati dan Jawa Tengah selama periode 1996-2000 secara grafis sebagaimana disajikan pada Ilustrasi 5.



Perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari total pos retribusi di Kabupaten Pati dan Jawa Tengah selama periode 1996-2000 secara rinci disajikan pada Lampiran 4. Untuk lebih mudah memperbandingkan perkembangan penerimaan tersebut secara grafis disajikan pada Ilustrasi 6 berikut.



Perkembangan kontribusi PDRB atau disebut juga nilai tambah bruto PPI Bajomulyo terhadap PDRB Kabupaten Pati dan nilai tambah bruto perikanan laut Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah serta kontribusi penerimaan retribusi TPI dari PPI Bajomulyo terhadap total penerimaan pos retribusi Kabupaten Pati dan kontribusi penerimaan retribusi TPI seluruh Jawa Tengah terhadap total penerimaan pos retribusi Jawa Tengah disajikan pada Tabel 8. Sebagai gambaran secara grafis kontribusi nilai tambah bruto dan retribusi TPI dari PPI Bajomulyo terhadap total PDRB dan total retribusi Kabupaten Pati sebagaimana disajikan pada Ilustrasi 7 berikut.



Tabel 8.
Perkembangan Kontribusi Nilai Tambah Bruto Perikanan Laut dan
Retribusi TPI Terhadap Kabupaten Pati dan Jawa Tengah
1996 – 2000

No	Tahun	PROP. JAWA TENGAH		KABUPATEN PATI		
		Terhadap PDRB Prop. Jateng	Retribusi TPI Thd Total Retribusi Prop. Jateng	Terhadap PDRB Kab. Pati	Ret.TPI Bajomulyo Thd Total Ret. Kab. Pati	Total Ret.TPI Thd Total Ret.Kab. Pati
1.	1996	0,56 %	8,48 %	3,88 %	16,56 %	17,79 %
2.	1997	0,58 %	9,04 %	3,66 %	18,34 %	24,79 %
3.	1998	0,86 %	17,54 %	5,44 %	3,26 %	3,46 %
4.	1999	0,55 %	14,73 %	4,34 %	3,15 %	3,38 %
5.	2000	0,49 %	13,07 %	3,64%	8,09 %	8,69 %
Jumlah		3,04 %	62,86 %	20,96 %	49,35 %	58,11 %
Rata-rata		0,608 %	12,57 %	4,19 %	9,87 %	11,62 %

Sumber : Tabel 6, Tabel 7, Lampiran 3 dan Lampiran 4.

Pada Ilustrasi 7. dan Tabel 8 menunjukkan bahwa sejak 1998 kontribusi retribusi TPI mengalami penurunan yang drastis dan baru pada tahun 2000 mulai menunjukkan peningkatan kembali. Kondisi terjadi diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan fiskal oleh Pemerintah, yakni ditetapkannya UU 18/1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diantaranya membatasi pemungutan retribusi daerah termasuk retribusi TPI, sehingga pada tahun 1998 merupakan masa transisi yang sangat sulit. Untuk itu Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menetapkan Perda 3/1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disempurnakan dengan Perda 3/2000.

Sebagai pusat kegiatan perikanan laut, PPI Bajomulyo menyerap tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan yang berkaitan (*linkage*) dengan kegiatan perikanan laut, baik keterkaitan ke depan (*forward linkage*) maupun kegiatan yang berkait ke belakang

(*backward linkage*). Penyerapan tenaga kerja langsung diantaranya adalah nelayan juragan maupun pendega, bakul ikan, karyawan TPI/KUD dan lain-lain berfluktuasi dan penyerapan tenaga kerja tertinggi dicapai pada tahun 1998 sebanyak 3.462 orang cenderung menurun menjadi 3.337 orang tahun 1999 dan 3.193 orang pada tahun 2000, Selama periode pengamatan penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah nelayan baik juragan maupun nelayan pendega. Penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja langsung diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya karena terjadinya krisis ekonomi sehingga terjadi inflasi yang tinggi dan harga barang-barang menjadi mahal dan menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana penangkapan ikan hampir tidak mampu diperbaiki. Disamping itu diduga semakin menurunnya status sumberdaya ikan mengakibatkan hasil tangkapan menurun. Secara rinci penyerapan jenis tenaga langsung disajikan pada Tabel 9 dan secara grafis disajikan pada Ilustrasi 8.

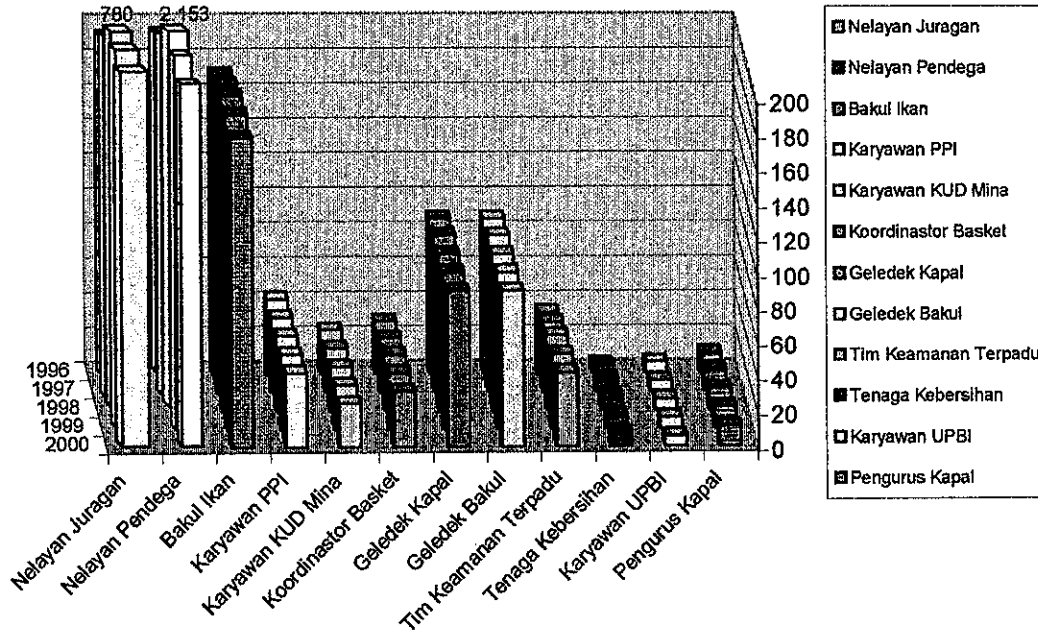
Tabel 9.
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Langsung
di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000 (orang)

No	Jenis Pekerjaan	1996	1997	1998	1999	2000
1.	Nelayan Juragan	605	672	780	721	673
2.	Nelayan Pendega	1.851	1.995	2.153	2.087	1.994
3.	Bakul Ikan	172	177	181	181	178
4.	Karyawan PPI	43	43	43	43	43
5.	Karyawan KUD Mina	25	25	25	25	25
6.	Koordinastor Basket	30	31	32	32	32
7.	Geledak Kapal	89	90	90	90	90
8.	Geledak Bakul	89	90	90	90	90
9.	Tim Keamanan Terpadu	35	40	43	43	43
10.	Tenaga Kebersihan	5	7	7	7	7
11.	Karyawan UPBI	6	6	6	6	6
12.	Pengurus Kapal	11	12	12	12	12
Jumlah		2.961	3.188	3.462	3.337	3.193

Sumber : Hasil Penelitian di PPI Bajomulyo, 2001

UPT-PUSTAK-UNDIP

Ilustrasi 8. Histogram Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Langsung di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000 (Orang)



Penyerapan tenaga kerja tidak langsung yang terkait ke belakang di antaranya adalah tenaga kerja dok/galangan kapal, tenaga kerja penyedia BBM, tenaga penyedia perbekalan es, garam, suku cadang, mesin kapal, bahan alat perikanan, ransum dan lain sebagainya. Secara keseluruhan PPI Bajomulyo dapat memberikan kesempatan berusaha yang terkait ke belakang dan menyerap tenaga kerja berturut-turut sebanyak 459 orang tahun 1996, 485 orang tahun 1997, 498 orang tahun 1998, 495 orang tahun 1999 dan 496 orang pada tahun 2000. Penyerapan tenaga kerja yang terkait ke belakang dengan kegiatan perikanan di PPI Bajomulyo secara umum tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu tinggi, secara rinci disajikan pada tabel 10 berikut.

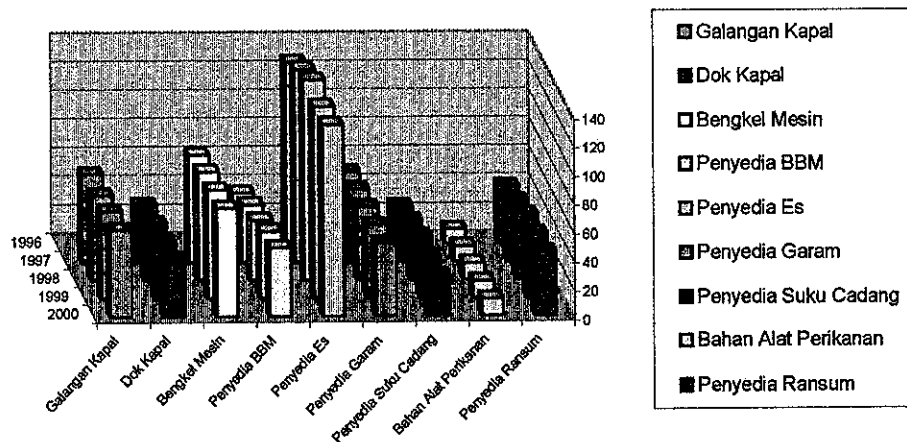
Tabel 10.
Penyerapan Tenaga Kerja Yang Terkait Ke Belakang Dengan
Kegiatan Perikanan di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000 (orang)

No	Jenis Kegiatan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000
1.	Galangan Kapal	60	62	60	61	61
2.	Dok Kapal	38	40	40	40	40
3.	Bengkel Mesin	72	75	76	76	76
4.	Perbekalan :					
	a. Penyedia BBM	36	40	42	47	48
	b. Penyedia Es	127	135	140	134	134
	c. Penyedia Garam	50	51	51	51	51
	d. Penyedia Suku Cadang	26	29	31	29	29
	e. Bahan Alat Perikanan	10	11	12	12	12
	f. Penyedia Ransum	40	42	46	45	45
	g. Lain-lain	-	-	-	-	-
	Jumlah	459	485	498	495	496

Sumber : Hasil Penelitian di PPI Bajomulyo, 2001.

Untuk memberikan gambaran fluktuasi penyerapan tenaga kerja tidak langsung yang terkait dengan kegiatan perikanan di PPI Bajomulyo periode 1996-2000, secara grafis berikut disajikan pada Ilustrasi 9.

Ilustrasi 9. Histogram Penyerapan Tenaga Kerja Yang Terkait ke Belakang Dengan Kegiatan Perikanan di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000 (Orang)



Penyerapan tenaga kerja yang terkait ke depan diantaranya adalah pengolah ikan, tenaga pegangkutan distribusi hasil, pedagang kaki lima (PKL) dan lain-lain. Secara keseluruhan keberadaan PPI Bajomulyo

dapat membangkitkan kegiatan usaha yang terkait ke depan dan selama periode pengamatan dapat menyerap tenaga kerja sebagaimana disajikan pada Tabel 11. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada kegiatan usaha yang terkait ke depan ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat, hal ini diakibatkan dengan penurunan jumlah tenaga kerja langsung yang beralih ke kegiatan pengolahan ikan yang merupakan jenis kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan kegiatan sebelumnya.

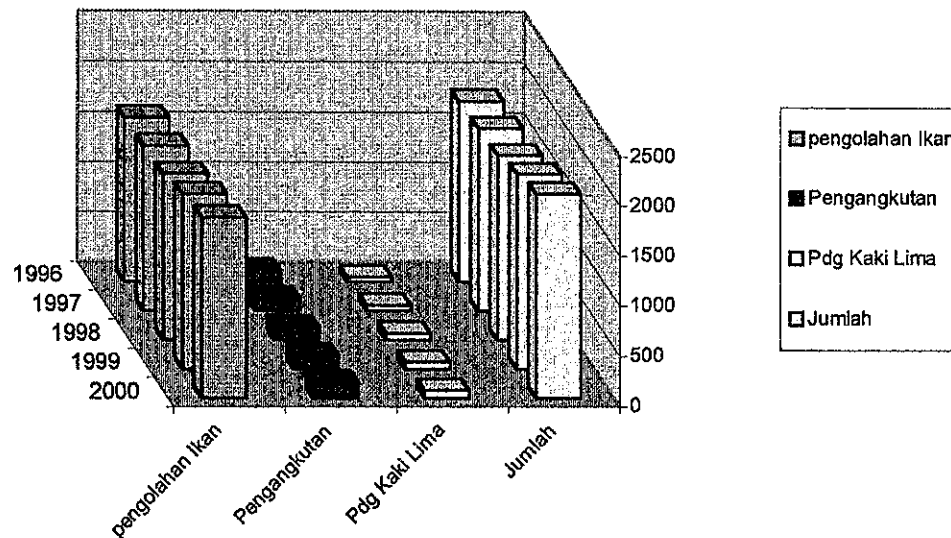
Tabel 11.
Penyerapan Tenaga Kerja Yang Terkait Ke Depan Dengan Kegiatan Perikanan di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000 (orang)

No.	Jenis Kegiatan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000
1.	Pengolahan Ikan :	1.647	1.655	1.655	1.740	1.796
	a. Pemindangan	1369	1.375	1.375	1.430	1.430
	b. Pengasinan/Gereh	238	240	240	270	270
	c. Pembuatan Ikan Peda	-	-	-	-	-
	d. Pengasapan	40	40	40	40	40
	e. Pembuatan Terasi	-	-	-	-	15
	f. Pembuatan Kerupuk	-	-	-	-	41
2.	Pengangkutan :	120	123	127	135	162
	a. Truck	95	96	95	105	90
	b. Pick Up	-	-	-	-	20
	c. Dokar	-	-	-	-	27
	d. Becak	-	-	-	-	-
	e. Tenaga Bojok (Spd)	25	27	28	30	25
3.	Pabrik Pembekuan	-	-	-	-	-
4.	Perusahaan Ekspor Ikan	-	-	-	-	-
5.	Pedagang Kaki Lima	49	56	67	69	76
	Jumlah	1.816	1.834	1.845	1.944	2.034

Sumber : Hasil Penelitian di PPI Bajomulyo, 2001

Fluktuasi penyerapan tenaga kerja yang terkait ke depan (*forward linkage*) dengan kegiatan perikanan di PPI Bajomulyo selama periode pengamatan 5 tahun (1996-2000) sebagaimana disajikan secara grafis pada ilustrasi 10 berikut.

Ilustrasi 10. Histogram Penyerapan Tenaga Kerja Yang Terkait ke Depan Dengan Kegiatan Perikanan di PPI Bajomulyo Tahun 1996-2000 (Orang)



4.2. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan beberapa data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan maupun data yang diperoleh melalui buku-buku referensi, selanjutnya dapat dianalisis dan dibahas sesuai dengan alat analisis data yang telah dikemukakan di depan untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan serta mencapai tujuan penelitian. Analisis dan pembahasan hasil penelitian diuraikan berikut ini.

4.2.1. Volume Produksi dan Jumlah Kapal Mendarat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume produksi maupun jumlah kapal yang mendarat selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang sangat berarti. Sebagaimana disajikan pada tabel 4, bahwa jumlah kapal yang mendarat di PPI Bajomulyo terus menurun selama tahun pengamatan. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1999, yakni menurun dari 1.429 unit pada tahun 1998 menjadi 1.241 unit pada

tahun 1999 atau menurun 13,16 %. Kondisi penurunan ini banyak diakibatkan oleh penurunan jumlah kapal yang mendarat yang datang dari luar daerah, sedangkan jumlah kapal yang mendarat yang berasal dari daerah setempat setiap tahun terus meningkat kecuali pada tahun 1999 yang mengalami penurunan sebesar 7,56 %.

Penurunan jumlah kapal yang mendarat di PPI Bajomulyo diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya adalah : kondisi muara sungai Juana (alur pelayaran masuk) mengalami pendangkalan dan fasilitas yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Di samping itu dengan adanya kebijakan pelaksanaan otonomi daerah, maka masing-masing daerah berusaha memperbaiki kinerjanya dengan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat termasuk PPI yang merupakan salah satu sumber PAD bagi pembangunan daerah. Dengan demikian kapal-kapal yang dulunya mendarat dan melelangkan ikan hasil tangkapannya di PPI Bajomulyo, kembali ke daerahnya masing-masing. Akibat penurunan jumlah kapal yang mendarat di PPI Bajomulyo, sudah barang tentu sangat mempengaruhi volume produksi ikan yang dilelangkan di PPI Bajomulyo.

Dengan semakin menurunnya jumlah kapal yang mendarat di PPI Bajomulyo tersebut di atas, maka akan lebih baik jika pihak pengelola baik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Pati, untuk sementara tidak terlalu banyak mengembangkan fasilitas yang ada di PPI Bajomulyo. Namun demikian terus berupaya mengoptimalkan fasilitas dan sumberdaya yang telah ada serta meningkatkan pelayanan kepada para pengguna.

4.2.2. Analisis location quotient (LQ)

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kontribusi/peranan PPI Bajomulyo baik terhadap PDRB maupun terhadap PAD Kabupaten Pati dilakukan dengan analisis Location Quotient (LQ). Nilai LQ diperoleh dengan rumus sebagaimana formulasi yang telah dikemukakan di depan dan hasilnya menunjukkan peranan/kemampuan kegiatan perikanan di PPI Bajomulyo adalah sebagai berikut :

1. Peranan/kontribusi PPI Bajomulyo terhadap PDRB Kabupaten Pati rata-rata adalah sebesar 4,19%, di samping itu dari analisis menunjukkan bahwa nilai LQ dari sektor perikanan laut di PPI Bajomulyo sebesar 6,91;
2. Peranan/kontribusi terhadap PAD pos retribusi Kabupaten Pati rata-rata adalah sebesar 9,87 % dengan nilai LQ sebesar 1,01.

Hasil analisis tersebut di atas menunjukkan bahwa kegiatan sektor/sub sektor perikanan laut di PPI Bajomulyo merupakan *industry basic* dengan nilai LQ >1. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perikanan laut di PPI Bajomulyo memiliki peranan/kemampuan yang lebih baik dibandingkan rata-rata sektor/sub perikanan perikanan di wilayah referensi yakni Propinsi Jawa Tengah. Sebagai suatu sektor/sub sektor yang memiliki nilai LQ yang jauh di atas 1, maka PPI Bajomulyo telah memberikan aliran pendapatan baik langsung maupun tidak langsung kepada Kabupaten Pati. Masuknya arus pendapatan dari luar akan menggerakkan kegiatan perikanan laut di PPI Bajomulyo menjadi lebih besar lagi dan selanjutnya akan menggerakkan sektor-sektor lain yang

berkaitan dengan kegiatan perikanan laut di PPI Bajomulyo. Hasil analisis Location Quotient (LQ) secara lengkap disajikan pada Tabel 12.

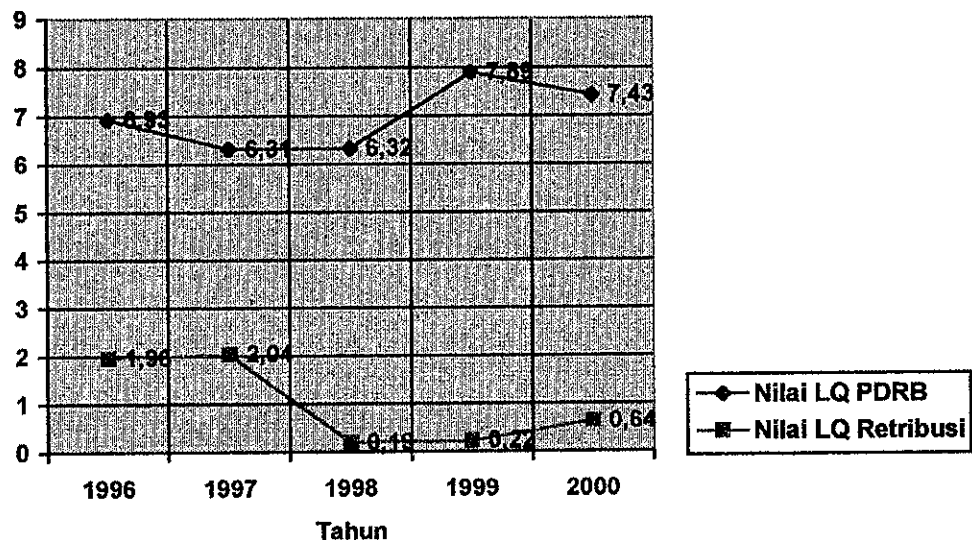
Tabel 12.
Hasil Analisis LQ Ditinjau dari Aspek PDRB dan
PAD (khususnya pos retribusi) di PPI Bajomulyo 1996 – 2000

No.	Tahun	Nilai LQ PDRB	Nilai LQ Retribusi
1.	1996	6,93	1,96
2.	1997	6,31	2,04
3.	1998	6,32	0,19
4.	1999	7,89	0,22
5.	2000	7,43	0,64
Jumlah		34,56	5,05
Rata-rata		6,91	1,01

Sumber : Tabel 8. (diolah)

Untuk melihat gambaran fluktuasi perkembangan nilai LQ ditinjau dari aspek PDRB maupun retribusi selama periode pengamatan 5 tahun (1996-2000), secara grafis dapat dilihat pada Ilustrasi 11.

Ilustrasi 11.
Grafik Hasil Analisis LQ Ditinjau Dari Aspek PDRB dan PAD
(khususnya pos retribusi) di PPI Bajomulyo 1996-2000



4.2.3. Analisis model rasio pertumbuhan (MRP)

Hasil analisis Model Rasio Pertumbuhan untuk mengetahui kemampuan pertumbuhan sektor/sub sektor perikanan laut di wilayah studi yaitu PPI Bajomulyo dibandingkan dengan wilayah referensi yakni Propinsi Jawa Tengah. Hasil analisis LQ dan RPs yang di-*overlay* menunjukkan bahwa sektor/sub sektor perikanan sebagai salah satu sektor/sub sektor ekonomi primer termasuk kriteria yang *sangat potensial* pada tahun 1996, 1998 dan 2000, sedangkan pada tahun 1997 dan 1999 termasuk kriteria *cukup potensial*. Pada kriteria tersebut sektor/sub sektor perikanan laut di PPI Bajomulyo memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Pati ditinjau dari aspek PDRB sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13.
Hasil Analisis MRP Overlay Nilai LQ dan RPs Ditinjau dari Aspek PDRB Sektor Perikanan di PPI Bajomulyo 1996-2000

No	Tahun	Nilai Absolut		Nilai Nominal			Kriteria/ Deskripsi	Skor
		LQ	RPs	LQ	RPs	Total		
1.	1996	6,93	1,16	(+)	(+)	(+) (+)	Sangat Potensial	4
2.	1997	6,31	0,35	(+)	(-)	(+) (-)	Cukup Potensial	2
3.	1998	6,32	1,09	(+)	(+)	(+) (+)	Sangat Potensial	4
4.	1999	7,89	-0,59	(+)	(-)	(+) (-)	Cukup Potensial	2
5.	2000	7,43	1,34	(+)	(+)	(+) (+)	Sangat Potensial	4

Sumber : Tabel 5, Lampiran 3 dan Tabel 12. (diolah)

Ditinjau dari aspek kontribusi dan pertumbuhan retribusi TPI di PPI Bajomulyo terhadap Pemerintah Kabupaten Pati secara umum termasuk kriteria potensial untuk terus dikembangkan. Berdasarkan analisis MRP, kriteria terbaik terjadi pada tahun 1996 yaitu kriteria *sangat*

potensial karena baik dari sisi kontribusi maupun pertumbuhannya bernilai positif, sedangkan pada tahun 1997 termasuk kriteria *cukup potensial* karena walaupun memiliki kontribusi yang bernilai positif namun pertumbuhannya bernilai negatif. Pada tahun 1998 hasil analisis MRP menunjukkan kriteria *tidak potensial*, sedangkan pada tahun 1999 dan 2000 termasuk kriteria *potensial*. Kondisi demikian ini terjadi karena kegiatan usaha penangkapan ikan di laut bersifat dinamis yang banyak tergantung pada kondisi alam dan adanya perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah. Kendati demikian pada kriteria tersebut kontribusi retribusi TPI di PPI Bajomulyo masih dapat terus dikembangkan dan lebih diintensifkan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada para pengguna.

Tabel 14.
Hasil Analisis MRP Overlay Nilai LQ dan RPs Ditinjau dari Aspek PAD (Retribusi) Sektor Perikanan PPI Bajomulyo 1996-2000

No	Tahun	Nilai Absolut		Nilai Nominal			Kriteria/ Dskripsi	Skor
		LQ	RPs	LQ	RPs	Total		
1.	1996	1,96	5,94	(+)	(+)	(+) (+)	Sangat Potensial	4
2.	1997	2,04	0,36	(+)	(-)	(+) (-)	Cukup Potensial	2
3.	1998	0,19	-1,89	(-)	(-)	(-) (-)	Tidak Potensial	1
4.	1999	0,22	0,55	(-)	(+)	(-) (+)	Potensial	3
5.	2000	0,64	37,96	(-)	(+)	(-) (+)	Potensial	3

Sumber : Lampiran 3, Tabel 8 dan Tabel 12. (diolah)

Sarana dan prasarana dasar yang sangat penting bagi daya tarik kapal untuk melalangkan ikan hasil tangkapannya di suatu PPI adalah kondisi alur masuk yang berfungsi baik dan lancar. Sedangkan tingkat pelayanan yang banyak diharapkan oleh para nelayan diantaranya adalah

kecepatan bongkar ikan, kecepatan lelang, kecepatan dan ketepatan pembayaran hasil lelang serta bakul ikan yang bonafide. Secara rinci hasil analisis MRP selama kurun waktu 5 tahun pengamatan disajikan pada Tabel 14.

4.2.4. Analisis efisiensi dan efektivitas

Untuk dapat mengetahui tingkat efisiensi pemungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo perlu dilakukan analisis efisiensi dengan komponen besarnya biaya yang digunakan untuk pemungutan dan besarnya realisasi penerimaan pungutan retribusi TPI. Pada Tabel 15. disajikan hasil analisis tingkat efisiensi yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo termasuk kriteria sangat efisien secara keseluruhan maupun dipandang dari sudut penerimaan Kabupaten Pati. Hal ini karena untuk memperoleh bagian 0,95% dari nilai/raman produksi di PPI Bajomulyo, Pemerintah Kabupaten Pati hanya membutuhkan biaya yang sedikit untuk pos biaya keamanan, sedangkan biaya operasional keseluruhan dibebankan dari pos lain oleh PUSKUD Mina Baruna Propinsi Jawa Tengah yang berasal dari pungutan retribusi sebesar 5% sesuai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000.

Tingkat efisiensi tertinggi dicapai pada tahun 2000, 1997,1996, sehingga termasuk kriteria pemungutan yang sangat efisien. Pada tahun 1998 dan 1999 efisiensi termasuk kriteria tidak efisien, karena diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah era reformasi yang oleh masyarakat awam dimaknai lain dan adanya perubahan undang-undang

tentang pajak dan retribusi yang diikuti oleh diterbitkannya beberapa Inmendagri tentang pungutan retribusi daerah serta ketergantungannya dengan musim ikan.

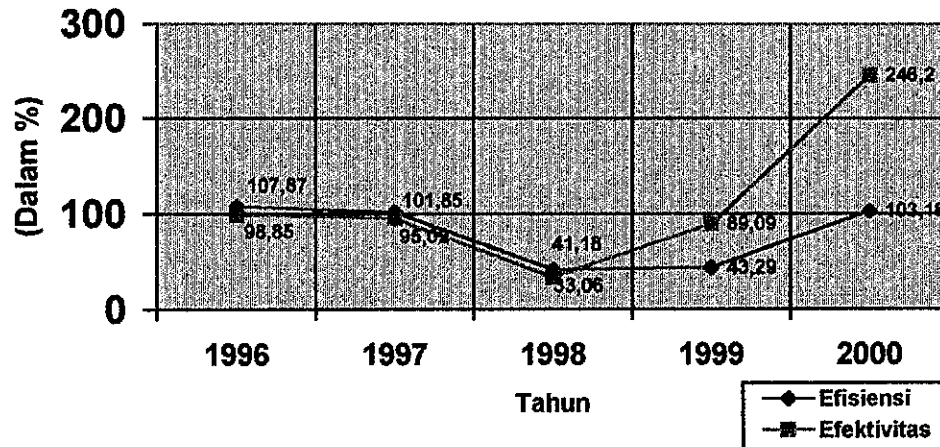
Tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan diukur dengan tingkat efektivitasnya. Alat analisis yang digunakan adalah *Charges Performance Index (CPI)* yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan retribusi TPI. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo tertinggi dicapai pada tahun 2000 dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan pada tahun 1996, 1997 dan 1999, termasuk dalam kriteria efektif karena masih mencapai 98,15; 95,02 dan 89,09 dari yang ditargetkan. Pada tahun 1998 tingkat efektivitas pemungutan termasuk dalam kriteria tidak efektif karena hanya mencapai 33,06% dari yang ditargetkan. Perkembangan tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo disajikan Tabel 15, sedangkan untuk memberikan gambaran fluktuasi selama periode 5 tahun pengamatan (1996-2000) secara grafis disajikan pada pada Ilustrasi 12.

Tabel 15.
Perkembangan Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
Pungutan Retribusi TPI di PPI Bajomulyo 1996-2000

No	Tahun	Efisiensi (%)	Kriteria	Efektivitas(%)	Kriteria
1.	1996	107,87	Sangat Efisien	98,85	Efektif
2.	1997	101,85	Sangat Efisien	95,02	Efektif
3.	1998	41,18	Tidak Efisien	33,06	Tidak Efektif
4.	1999	43,29	Tidak Efisien	89,09	Efektif
5.	2000	103,18	Sangat Efisien	246,72	Sangat Efektif

Sumber : Tabel 8. (diolah).

Ilustrasi 12.
Grafik Perkembangan Nilai Efisiensi dan Efektivitas
Pungutan Retribusi TPI di PPI Bajomulyo 1996-2000



Pada Ilustrasi 12 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1998 baik efisiensi maupun efektivitas menunjukkan penurunan, hal ini juga akibat adanya perubahan kebijakan fiskal dengan ditetapkannya UU 18 Tahun 1997. Tingkat efisiensi tidak selalu berkorelasi positif dengan tingkat efektivitas, karena tingkat efisiensi berkaitan dengan realisasi penerimaan pungutan dengan biaya yang digunakan, sedangkan tingkat efektivitas berhubungan dengan tingkat pencapaian target yang ditetapkan.

4.2.5. Penyerapan tenaga kerja

Sebagai pusat kegiatan perikanan laut keberadaan PPI Bajomulyo memberikan implikasi positif dengan tersedianya kesempatan/peluang kerja baik langsung maupun tidak langsung. Penyerapan tenaga kerja tidak langsung akibat adanya kegiatan perikanan laut di PPI Bajomulyo

dapat dilihat dari kegiatan yang terkait ke belakang (*backward linkage*) dan kegiatan yang terkait ke depan (*forward linkage*).

Selama periode pengamatan penyerapan tenaga kerja di PPI Bajomulyo berfluktuasi dan tertinggi dicapai pada tahun 1998 sebanyak 5.742 orang. Tingginya penyerapan tenaga kerja pada tahun 1998 diakibatkan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang di PHK dan salah satu kegiatan usaha yang tidak begitu terpuruk adalah kegiatan perikanan. Penyerapan tenaga kerja terbanyak berada pada penyerapan tenaga kerja langsung yang pada umumnya merupakan tenaga kerja nelayan dan bakul ikan, sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak langsung lebih banyak penyerapan tenaga kerja pada kegiatan yang terkait ke depan dibanding penyerapan tenaga kerja yang terkait ke belakang.. Lebih rinci penyerapan tenaga kerja akibat kegiatan perikanan laut di PPI Bajomulyo disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16.
Penyerapan Tenaga Kerja
Dengan Keberadaan Kegiatan Perikanan Laut di PPI Bajomulyo
Tahun 2000 (orang)

No	Keterkaitan	Tahun				
		1996	1997	1998	1999	2000
1.	Langsung	2.961	3.188	3.462	3.337	3.193
2.	Tidak Langsung	2.226	2.263	2.280	2.370	2.530
	a. Ke Belakang	459	485	498	495	496
	b. Ke Depan	1.767	1.778	1.782	1.875	2.034
	Jumlah	5.187	5.451	5.742	5.707	5.723

Sumber : Tabel 9., Tabel 10. dan Tabel 11.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja PPI Bajomulyo selama tahun pengamatan (1996-2000) mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kapal yang mendarat dan volume produksi. Hal ini mempengaruhi jumlah perolehan retribusi TPI sebagai sumber pendapatan daerah;
2. Kegiatan sektor/sub sektor perikanan laut di PPI Bajomulyo memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Pati karena memiliki kontribusi volume produksi 71,22% - 96,68% dan kontribusi nilai produksi (raman) 61,93% - 94,04%. Ditinjau dari aspek PDRB, PPI Bajomulyo memberikan kontribusi rata-rata 4,19% dengan nilai LQ 6,91 dan kontribusi terhadap penerimaan retribusi Pemerintah Kabupaten Pati rata-rata 9,87% dengan nilai LQ sebesar 1,01.
3. Tingkat efisiensi dalam hal pemungutan retribusi TPI di PPI Bajomulyo termasuk kriteria sangat efisien, karena biaya operasional PPI dibebankan kepada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah dari pos pemungutan retribusi TPI. Tingkat

efektivitas pencapaian target yang telah ditetapkan pada dasarnya termasuk kriteria efektif, akan tetapi karena ada beberapa kali terjadi perubahan peraturan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi, sehingga terjadi perubahan yang signifikan. Kondisi demikian terjadi karena pada saat periode penelitian masih merupakan masa transisi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1984 kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 dan penyempurnaannya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000.

4. Sebagai pusat kegiatan perikanan laut, PPI Bajomulyo dapat menyediakan peluang berusaha dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung sebanyak 5.273 orang pada tahun 2000.

5.2. Rekomendasi

Dalam rangka mendukung lancarnya pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Pati dapat disampaikan beberapa rekomendasi berikut ;

1. Pemerintah Kabupaten Pati hendaknya memperhatikan dan mendorong kegiatan usaha perikanan laut di PPI Bajomulyo, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan di daerah Kabupaten Pati dengan mengoptimalkan sumberdaya dan infrastruktur yang telah ada melalui peningkatan kinerja dan pelayanan yang memadai tanpa harus menambahnya, akan tetapi tetap harus

- memelihara dan merawatnya agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Kondisi muara sungai Juana sebagai pintu gerbang keluar-masuk ke PPI Bajomulyo perlu dijaga kedalamannya, sehingga dapat memperlancar arus keluar-masuk kapal dan menjadi salah satu daya tarik bagi kapal-kapal luar daerah.
 3. Guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), alangkah baiknya jika Pemerintah Kabupaten Pati menggali potensi yang ada di PPI Bajomulyo. Potensi penerimaan yang masih perlu ditingkatkan diantaranya parkir sarana transportasi darat, tambat kapal/perahu, retribusi PKL, dan lain sebagainya.
 4. PPI Bajomulyo juga merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*) bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Pati, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penelitian lebih lanjut yang difokuskan pada aspek ekonomi secara detail, sehingga diperoleh hasil analisis ekonomi secara akurat sebagai landasan dalam melanjutkan pembangunan.
 5. Berdasarkan jumlah kapal yang mendarat, volume dan nilai produksi serta kegiatan lain yang terkait dan kontribusinya terhadap PDRB, PAD maupun penyerapan tenaga kerja, maka PPI Bajomulyo merupakan salah satu PPI yang layak ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999¹⁾. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat. Penerbit Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1999²⁾. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. Penerbit BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LPFE-UI, Jakarta.
- Bendavid-Val, Avrom. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. Praeger Publisher, New York.
- Blakely, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development Theory and Practice*. 2th edition Saga Publication Inc., California.
- BPS. 1997-2000. *Pendapatan Regional Jawa Tengah 1996-1999*. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- BPS. 2001. *Selayang Pandang Jawa Tengah Tahun 2000*. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- BPS. 1997-2001. *Pendapatan Regional Kabupaten Pati 1996-2000*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. Pati.
- Devas, Nick dkk., 1987. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. UI Press, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan, 1996/1997. *Bku Petunjuk Pelaksanaan Struktur Organisasi dan Manajemen Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)*, Direktorat Bina Prasarana, Jakarta.
- Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1991. *Profil Potensi Perikanan Jawa Tengah*. Semarang.
- Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1997. *Final Report Pekerjaan Studi Kelayakan PPI Morodemak di Kabupaten Demak Jawa Tengah*, PT Astri Bumi, Semarang.
- Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1998. *Tatanan Fasilitas Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)*. Sub Dinas Bina Prasarana. Semarang.

- Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah. 2001. *Peningkatan Peranan Pelabuhan Perikanan Dalam Menunjang Otonomi Daerah*. Semarang.
- Kuncoro, Mudrajat. 1995. "Desentralisasi Fiskal Indonesia Dilema Otonomi dan Ketergantungan". *Prisma*. 1 April, 3-15.
- PAU-SE-UGM. 2000. *Model Perencanaan Ekonomi Regional Aplikasi Input Output Regional*. PAUSE-UGM, Yogyakarta.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 1996-2000. *Perhitungan Anggaran Pendatapan Daerah Propinsi Jawa Tengah*. Semarang
- Pemerintah Kabupaten Pati. 1996-2000. *Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pati*.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang "Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan", Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Semarang.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang, "Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999", Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Sidik, M. 2000. Kebijakan Fiskal Nasional Untuk Mendukung Otonomi Daerah, *Seminar Otonomi Daerah Dalam Rangka Lustrum I*, Program MEP-UGM, Yogyakarta.
- Soesilo, Y.S. 2000 "Pergeseran dan Prospek Sektoral: Studi Kasus Kabupaten Dati II Sleman Propinsi DIY". *Journal Bisnis dan Ekonomi Kinerja*. Volume IV, No. 1, 9-17.
- Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tentang "Penyelenggaraan Pelalangan Ikan".
- Wasirin, Imam. 2000. "Peranan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Semarang". *Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UGM*. Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).
- Yusuf, Maulana. 1999. "Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Salah Satu Alat Analisis Alternatif dan Perencanaan Wilayah dan Kota". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLVII, No. 2, 219-233.

Yuwono, Prapto. 1999. "Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/1999 dan UU 25/1999 (Studi Kasus Kotamadia Dati II Salatiga)", *Kritis*, Vol. XII No. 2, 41-61.

Todaro, Michael P. 1997. *Economic Development*, Sixth Edition. Longman, London and New York.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang "Pemerintahan Daerah",

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah".